



2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

2.3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan diwujudkan beserta indikator kinerja utamanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang berhasil dicapai. Pengukuran kinerja tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Terdapat 2 (dua) pengertian dalam pencapaian kinerja organisasi, yaitu :

1. Realisasi kinerja yang tinggi menunjukkan capaian kinerja yang tinggi atau sebaliknya, dan
2. Realisasi kinerja yang tinggi menunjukkan capaian kinerja yang rendah atau sebaliknya.

Metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran masing-masing indikator kinerja disimpulkan berdasarkan besaran capaian kinerja yang diperoleh, dengan katagori **berhasil apabila realisasi dapat mencapai/melebihi target** dan **tidak berhasil apabila realisasi tidak mencapai target**. Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”. Nilai akhir capaian (%) sasaran diperoleh dari rata-rata hasil penjumlahan capaian indikator pada sasaran tersebut.

Laporan Kinerja Tahunan kabupaten sebagai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten menggambarkan ukuran keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja utama pemerintah kabupaten. Karena itu indikator sasaran strategis yang diukur pada 14 (Empat belas) sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 - 2026 di dalam LKj ini adalah merupakan Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Bupati Mempawah Nomor



000.8.6.3/85/SETDA/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026.

IKU Sasaran Strategis dimaksud menggambarkan indikator hasil (outcome) dari kinerja utama instansi Pemerintah Kabupaten Mempawah, dengan kata lain IKU Kabupaten Mempawah disusun berdasarkan indikator-indikator sasaran strategis RPD yang masih bersifat indikator keluaran (output) kemudian diformulasikan menjadi indikator hasil (outcome), sehingga lebih tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mempawah.

2.3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Tahunan Kabupaten Mempawah dijelaskan melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja, (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, serta (3) akuntabilitas keuangan yang dibatasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13	98,39
		Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,40	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan hidup	Tahun	71,90	74,82	134,35
		Prevalensi Stunting	Persen	22,80	8,06	
3	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan resposif gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,04	89,87	98,87
4	Meningkatnya penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai sakiP	Nilai	70 (BB)	64,30 (B)	45,92
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	WTP	NA	
5	Meningkatnya pelayanan prima kepada publik	Indeks KeOpuasan masyarakat (IKM)	Nilai	84,21	85,50	101,53
6	Meningkatnya indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Predikat	3,4 (Baik)	2,89 (Baik)	85



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
7	Meningkatnya Sektor unggulan daerah	PDRB Perkapita	Rp.Juta	40.868	43.156	107,34
		Rasio PAD terhadap pendapatan	Persen	15,18	16,56	
8	Menurunnya kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,39	4,49	116,35
		Tingkat inflasi	Persen	3,32	2,16	
9	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Rasio	0,2746	0,257	106,41
10	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,9222	0,88	95,42
11	Meningkatnya Perluasan kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas dan perlindungan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,85	4,74	130,80
12	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	Persen	91	91,42	85
		Persentase Jalan Mantap	Persen	61,75	42,94	
13	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)	Indeks	68	67,30	98,97
14	Meningkatnya Ketahanan Kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Indeks	185	90,33	185,51

Secara lebih rinci pencapaian masing-masing sasaran strategis Kabupaten Mempawah tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

2.3.2.1. Sasaran 1 : " Meningkatkan Kualitas Pendidikan"

Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan" diarahkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah. Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun realisasi kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut :



a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13	98,26
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,40	98,53
Capaian Kinerja Sasaran				98,39	

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 2026

Berdasarkan tabel di atas Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja tersebut mencapai 98,39 %. capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini.

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Data BPS menunjukkan HLS Kabupaten Mempawah terus meningkat, mencapai 13,00 tahun pada 2025, setara dengan tahun pertama perguruan tinggi. Harapan Lama Sekolah (HLS) / Expected Years of Schooling adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini menggambarkan peluang anak usia dini untuk menempuh tingkat pendidikan tertentu di masa depan, dengan asumsi pola peluang bersekolah saat ini menetap. HLS dan RLS merupakan dua komponen utama yang membentuk Dimensi Pengetahuan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kegunaannya meliputi:

1. Mengukur Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Semakin tinggi HLS dan RLS, semakin tinggi kualitas pendidikan dan SDM di suatu wilayah.
2. Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Menilai keberhasilan program wajib belajar dan intervensi pendidikan yang dilakukan pemerintah.
3. Perencanaan Pembangunan: Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan strategi pembangunan bidang pendidikan dan sasaran peningkatan IPM.

4. Analisis Kemajuan Kualitas: Membandingkan tingkat pendidikan antarwilayah dan memantau kemajuan dari tahun ke tahun.

$$HLS = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Angka Harapan Lama Sekolah diperoleh dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas) atau secara matematis rumus harapan lama sekolah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir.

Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Batas nilainya adalah minimum 0 dan maksimum 15 tahun. Langkah-langkah penghitungannya adalah sebagai berikut:

Dari data mikro yang digunakan, seleksi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Hitung lamanya sekolah setiap penduduk berumur 25 tahun ke atas tersebut. Jika partisipasi sekolahnya adalah tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolahnya adalah 0. Jika partisipasi sekolahnya adalah masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi. Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah diperoleh melalui rumus sebagai berikut :

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=a}^n Xi$$



b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah	12,88	12,90	13	99,46	101,81	98,26
Rata-rata Lama Sekolah	7,20	7,21	7,40	99,31	103,14	98,53

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IKU	SATUAN	REALISASI 2025	Target Jangka Menengah
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13	13,5
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,40	7,78

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 13 sudah mendekati target jangka menengah sebesar 13,5.
2. Realisasi kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 7,40 belum mencapai target jangka menengah sebesar 7,78.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13	13,30
	Rata-rata Lama Sekolah	7,40	9,07



Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 13 sudah mendekati target nasional sebesar 13,30, sedangkan Realisasi kinerja rata-rata Lama Sekolah tahun 2025 sebesar 7,40 belum mencapai target nasional sebesar 9,07.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat/Hambatan/Kendala Pencapaian Kinerja

1. Masih belum semua sekolah yang mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah.
2. Belum lolosnya siswa sampai ke tingkat Nasional dan Belum pahamnya cara untuk pendaftaran peserta untuk mengikuti ajang lomba di Pusat Prestasi Nasional
3. Belum Terpenuhinya Quota Penerimaan Guru ASN PPPK
4. masih terdapat sekolah yang mengalami keterlambatan sinkronisasi pada aplikasi sehingga pada saat cut off data, terdapat ketidaksesuaian data
5. Sekolah belum memahami Juknis Penggunaan Dana BOS
6. Kurangnya pemahaman guru dalam penggunaan peralatan TIK dalam proses Pembelajaran
7. Kurangnya pemahaman guru dalam pembuatan bahan ajar melalui kontel digital secara merata
8. Kurangnya pemahaman guru dalam penggunaan aplikasi dalam pelaporan e – raport, Pelatihan Digitalisasi IFP secara merata
9. Kurangnya Perencanaan pelaksanaan pembelajaran, supervisi dan evaluasi yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru dalam proses perencanaan
10. Masih belum meratanya pemahaman kepala sekolah tentang Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
11. Masih kurangnya pelaksanaan fasilitasi dalam Kombel Pendidik dan Tendik
12. Sering terjadinya perundungan dan, kekerasan yang di lakukan peserta didik di lingkungan sekolah
13. Kurangnya buku Teks dan non teks untuk mendukung sekolah
14. Masih ada guru yang pendidikannya belum S-1 dan yang belum memiliki sertifikat Pendidik



Strategi Pemecahan Masalah :

1. Melakukan usulan kepada sekolah yang memerlukan Pembangunan
2. Perlunya latihan secara intensif dalam mempersiapkan lomba dan perlunya sosialisasi yang mendalam agar sekolah memahami cara pendaftaran siswa dalam mengikuti ajang lomba
3. Mengusulkan Kembali Penerimaan Guru ASN PPPK pada Tahun Berikutnya agar dapat Memenuhi jumlah tenaga pendidik
4. Melakukan pembinaan dengan monev rutin dan verifikasi data dapodik ke sekolah-sekolah sehingga tidak terdapat kesalahan dalam penyajian data.
5. Melakukan sosialisasi ke sekolah agar sekolah dapat memahami juknis penggunaan dana bos sebelum menggunakan dana tersebut
6. Meningkatnya kemampuan guru dalam penggunaan peralatan TIK dalam proses Pembelajaran di kelas
7. Perlu dilakukan pengimbasan dan deseminasi dalam setiap pertemuan kombel di Kabupaten Mempawah
8. Memberikan bimbingan dan evaluasi dalam penggunaan aplikasi dalam pelaporan e –raport, Pelatihan Digitalisasi IFP dan Perlu dilakukan pengimbasan dan deseminasi dalam setiap pertemuan kombel di Kabupaten Mempawah
9. Monitoring, evaluasi dan bimbingan kepada Kepala sekolah oleh pengawas satuan pendidikan agar lebih dioptimalkan
10. Memberikan bimbingan dan evaluasi Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan secara berkala
11. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kombel secara berkala
12. Memberikan bimbingan kepada Kepala Sekolah, Guru, dan siswa dalam pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Toleransi di lingkungan sekolah
13. Melaksanakan pendataan saran untuk mendukung sekolah mendukung program Kemendikbudristek
14. Melakukan pendampingan agar mereka bisa lulus PPG dan juga memotivasi agar mereka mau melanjutkan pendidikan minimal S-1



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	70.482.439.122	69.482.082.352	98,58	98,39	NA
Rata – Rata					98,58	98,39	NA

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai 100%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan Program Pengelolaan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warna negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, meningkatkan partisipasi warna negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, meningkatkan partisipasi warga negara usia 5-6 tahun untuk berpartisipasi dalam PAUD dan meningkatkan partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2.3.2.2. Sasaran 2 : " Meningkatkan Kualitas Kesehatan "

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia" dalam rangka Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Prevalensi Stunting. Angka Harapan



Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Sedangkan Prevalensi Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis (jangka panjang), terutama selama 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang membuat tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata usianya dan dapat memengaruhi perkembangan otak serta resiko penyakit dikemudian hari.

Secara lebih rinci, pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Angka harapan hidup	Tahun	71,90	74,82	104,06
Prevalensi Stunting	Persen	22,80	8,06	164,65
Capaian Kinerja Sasaran				134,35

Sumber : DiskesPPKB Kabupaten Mempawah, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 indikator Angka Harapan Hidup dengan realisasi 74,82 tahun telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 71,90 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah semakin meningkat. Faktor yang paling besar berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup adalah Angka Kematian Bayi, AKB dipengaruhi oleh kesehatan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, imunisasi, gizi, lingkungan, jaminan Kesehatan dan lain-lain. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Realisasi indikator Prevalensi Stunting juga menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu sebesar 8,06% dengan capaian kinerja sebesar 164,65%. Prevalensi



stunting didapat berdasarkan data EPPGBM. EPPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) adalah aplikasi berbasis web milik Kemenkes yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan data gizi individu (terutama balita dan ibu hamil). Aplikasi ini bertujuan memantau status gizi, deteksi dini stunting, dan merencanakan intervensi gizi tepat sasaran, dilakukan setiap bulan dengan sasaran seluruh balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas/Desa/Posyandu. Persentase data Balita stunting di ambil dengan cara menghitung rerata balita di timbang di bagi jumlah rerata balita stunting di tahun tersebut. Komponen penghitungan stunting yaitu panjang badan atau tinggi badan anak dibanding dengan usia (0 s.d 59 bulan).

Capaian kinerja Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting tersebut di atas diperoleh berdasarkan data profil kesehatan sebagai berikut :

1. AKB sebesar 8,94/1000 kelahiran hidup.
2. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 85,44%
3. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 80,89%
4. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 83,17%
5. Cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 93,30%
6. Cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 54,96%
7. Jumlah balita gizi buruk sebanyak 15 orang
8. Jumlah peserta JKN sebanyak 310.191 peserta.
9. Persentase balita stunting 8,06%.

Pada dasarnya, cara memperpanjang angka harapan hidup suatu wilayah tidak hanya bergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat. Pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan pentingnya pendidikan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan anak yang memadai, memprioritaskan program kesehatan masyarakat, seperti program gizi dan vaksinasi anak. Pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi ibu, pemberian ASI eksklusif, MPASI bergizi seimbang, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup	74,04	74,34	74,82	103,50	104,94	104,06
Prevalensi Stunting	9,48	7,40	8,06	-	-	164,65

Tabel di atas menunjukkan bahwa baik realisasi maupun capaian kinerja indikator Angka Harapan hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk indikator prevalensi stunting jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,66.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
			2025	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,82	75,86
	Prevalensi Stunting	%	8,06	14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2025 Angka Harapan Hidup yaitu 74,82 tahun dengan target jangka menengah yaitu 75,86 tahun, maka realisasi indikator tersebut di atas belum mencapai dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan indikator prevalensi stunting sudah melampaui target jangka menengah yang telah ditetapkan.



d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	74,82	74,43
	Prevalensi Stunting	8,06	18,8

Jika dibandingkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 74,82 tahun dengan dengan AHH Nasional Tahun 2025 74,43 tahun, maka AHH Kabupaten Mempawah sudah melampaui target nasional yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan realisasi indikator Prevalensi Stunting sudah melampaui target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategi Pemecahan Masalah

Secara umum pencapaian sasaran ini sudah melampaui target yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk mendapatkan beberapa pelayanan di antaranya konseling, deteksi dini risiko tinggi, monitoring hemoglobin, serta pemberian tablet zat besi secara teratur.
2. Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di daerah perkotaan juga mempengaruhi ibu hamil dalam mengakses pelayanan kesehatan.
3. Waktu tunggu yang lama dan waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh.
4. Faktor sosial budaya, seperti pertolongan persalinan oleh dukun masih terjadi di beberapa wilayah karena persalinan tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.



5. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membawa bayi dan balita melakukan kunjungan ke posyandu. Kunjungan ke Posyandu hanya akan dilakukan sampai balita mencapai imunisasi dasar lengkap di usia 12 bulan, setelah itu masyarakat cenderung kurang berminat untuk membawa lagi balitanya ke Posyandu.
6. Kurangnya gizi dan pola asuh yang tidak optimal sejak dalam kandungan.
7. Kebiasaan seperti pola makan tidak seimbang, ASI dan MPASI yang tidak tepat.
8. kurangnya perhatian pada gizi ibu hamil, serta sanitasi yang buruk masih sering terjadi di masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah

Adapun upaya untuk meningkatkan pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care.
2. Pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil saat kunjungan.
3. Mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan puskesmas kepada masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi dan koordinasi secara lebih intens kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan yang lain untuk turut meningkatkan kepedulian masyarakat akan kesehatan ibu.
5. Memberikan berbagai edukasi tentang kesehatan ibu, anak dan keluarga.
6. Pelatihan-pelatihan bagi petugas kesehatan terus diberikan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan.
7. Meningkatkan status sarana-sarana kesehatan yang ada disertai dengan fasilitas yang lengkap sesuai standar sehingga ibu dapat bersalin dengan aman dengan demikian dapat menekan risiko kematian ibu dan bayi.
8. Optimalisasi kemitraan bidan dan dukun dan lebih memaksimalkan peran kader dan kepedulian keluarga dalam pendampingan ibu hamil.
9. Koordinasi lintas sektor tentang deteksi dini pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
10. Penguatan tindakan rujukan jika sewaktu-waktu diperlukan oleh ibu dan bayi untuk didalam menangani permasalahan yang harus segera dilakukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.



11. a. Penanganan Sebelum Lahir (Hulu)

- Remaja putri : Konsumsi tablet tambah darah
- Calon pengantin : diberikan pelayanan kesehatan produksi
- Ibu hamil : pemberian tablet tambah darah, pemberian PMT lokal bagi ibu hamil KEK

b. Penanganan Sesudah Lahir (Hilir)

- Bayi : Pemberian ASI Eksklusif, memperoleh imunisasi dasar lengkap
- Baduta : Anak usia 6 – 23 bulan mendapat MP ASI
- Balita : Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi, balita gizi buruk mendapat pelayanan tatalaksana gizi buruk.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.485.408.148	72.350.857.013	87,71	134,35	46,83
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.219.385.902	1.709.228.337	77,01		
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	396.674.529	363.895.406	91,73		
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	284.388.224	262.516.052	92,30		



	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	277.035.032	246.136.410	88,84		
Rata – Rata				87,52	134,35	46,83

Refocusing dilakukan sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dilakukan melalui beberapa pertimbangan antara lain prioritas program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kegiatan penunjang. Dalam rangka refocusing tersebut lebih ditekankan kepada kegiatan penunjang yang kegiatannya berada di Dinas Kesehatan Kabupaten, sedangkan Puskesmas penganggarannya tidak dilakukan refocusing karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Anggaran yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tidak dirasionalisasi karena merupakan dana alokasi umum yang penggunaannya diperuntukkan untuk bidang kesehatan.

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 87,52% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 134,35%, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 46,83. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan tidak efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja karena terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dengan pelaksanaannya. Realisasi belanja mencapai target, namun tidak berdampak pada pencapaian target kinerja dan sasaran strategis. Kondisi ini sering disebabkan oleh fokus pada penyerapan dana 100%, daripada orientasi output/outcome, lemahnya indikator kinerja, serta tidak optimalnya monitoring evaluasi. Namun, program dan kegiatan saat ini telah efektif dalam menunjang keberhasilan indikator kinerja utama.



h. Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja, namun tidak maksimal diakomodir dalam APBD seperti pengadaan alat kesehatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan. Penyediaan alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas sangat vital untuk diagnosa dan perawatan, namun keterbatasan anggaran menuntut strategi efisiensi. Solusi efektif meliputi manajemen pemeliharaan yang baik agar alat tahan lama, serta optimalisasi alur kerja tenaga kesehatan. Kedepannya, diharapkan program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan sangat diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD.

i. Strategi /langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun Berikutnya

Strategi yang akan dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah strategis dan evaluasi atas kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya seperti validasi sasaran, inovasi kegiatan, dan koordinasi dan konsolidasi baik tingkat Provinsi maupun Pusat.
2. Penajaman prioritas kegiatan berdasarkan capaian kinerja yang rendah.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas bagi Masyarakat.
4. Akselerasi pemenuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia produktif, dan lanjut usia yang berkualitas.
5. Akselerasi pemenuhan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit yang berkualitas.
6. Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Intervensi masalah gizi di masyarakat.
7. Peningkatan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
8. Peningkatan advokasi, pemberdayaan, promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat.



2.3.2.3. Sasaran 3 : "Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender"

Sasaran ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia dalam rangka. Keberhasilan sasaran ini diukur melalui capaian indikator Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia (kesehatan, pendidikan dan standar hidup) dengan menyoroti ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG mengevaluasi seberapa besar perempuan tertinggal atau setara dalam pembangunan dibandingkan laki-laki, dengan nilai mendekati 100 menunjukkan kesetaraan yang lebih tinggi.

Tujuan utama Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPG menjadi alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan pembangunan berwawasan gender, sekaligus memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender.

Adapun realisasi Indikator kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	89,87	99,81
Capaian Kinerja				99,81

Sumber : Dinas Sosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 89,87 dengan capaian kinerja sebesar 99,81%. Semakin mendekati angka 100, berarti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semakin baik.

Indeks Pembangunan Gender merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian Pembangunan manusia. Nilai Indeks



Pembangunan Gender merupakan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia laki-laki.

Berikut adalah poin-poin utama tujuan IPG secara rinci :

1. Mengukur ketimpangan : mengevaluasi sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki hak dan akses yang setara terhadap hasil pembangunan.
2. Acuan Kebijakan : menjadi bahan acuan pemerintah dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pembangunan agar lebih berkeadilan gender.
3. Pemetaan Wilayah : memberikan gambaran posisi, kecepatan dan disparitas pembangunan manusia berbasis gender antardaerah (nasional, provinsi, kabupaten/kota).
4. Indikator Pencapaian : mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang mengakomodasi persoalan gender.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender	88,53	89,64	89,87	-	-	99,81

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	IKU	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	89,87	91,13



Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 sebesar 89,03 masih dibawah target jangka menengah sebesar 91,13, atau perlu peningkatan nilai sebanyak 2,1 point untuk mencapai target akhir pembangunan jangka menengah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan resposif gender	Indeks Pembangunan Gender	89,87	91,85

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Mempawah tahun 2025 masih berada dibawah target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan Faktor-Faktor Penghambat dan kendala yang dihadapi

Penyebab Keberhasilan/Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Perencanaan dan anggaran yang memadai serta motivasi yang tinggi.
2. Kemampuan SDM serta motivasi yang tinggi.

Penyebab kegagalan pencapaian/penurunan kinerja Adalah :

1. Rendahnya tingkat Pendidikan
2. Kurangnya kesempatan pengembangan diri bagi Perempuan.
3. Anggaran yang kurang memadai serta minimnya sarana dan prasarana.

Upaya yang dilakukan untuk pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Adalah penguatan didalam perencanaan, optimalisasikan sumber daya.

Alternatif Solusi yang telah/dapat dilakukan dalam peningkatan pencapaian kinerja adalah Memaksimalkan perencanaan, peningkatan kapasitas bagi perempuan, pengembangan Perempuan di semua bidang dan selalu melakukan kolaborasi dengan pihak terkait. Upaya yang dilakukan untuk pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Adalah penguatan didalam perencanaan, optimalisasikan sumber daya.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga sejahtera dan responsif gender	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000	39.252.595	98,13	99,81	NA
Rata – Rata				98,13	99,81	NA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,13% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 99,81%, maka penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai 100%.

Analisis efisiensi yang menjelaskan identifikasi anggaran yang berhasil di refocusing sebagai tindak lanjut dari penghitungan kinerja secara berkala. Refocusing dilakukan menjadikan sumber daya keuangan terbatas dan tuntutan kebutuhan terus meningkat, maka SDM dituntut untuk mampu mengelola anggaran dengan cara yang paling optimal. Efisiensi anggaran bukan hanya soal menghemat pengeluaran, tetapi juga tentang bagaimana memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia agar memberikan hasil terbaik.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penjelasan Program/Kegiatan/sub kegiatan yang tidak efektif dalam menunjang keberhasilan kinerja Adalah :

- a. Kurangnya dukungan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat
- b. Memaksimalkan perencanaan serta mengevaluasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.



Penjelasan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja Adanya bimbingan teknis PUG dan peningkatan kapasitas Perempuan disegala bidang.

Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya ialah dengan Penguatan perencanaan, mengoptimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM dan diharapkan capaian kinerja dapat meningkatkan dan berkelanjutan.

2.3.2.4. Sasaran 4 : " Meningkatkan Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien"

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik". Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan WTP.

Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian/evaluasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sedangkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun realisasi kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Sakip	Nilai	70 (BB)	64,30 (B)	91,85



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	WTP	NA	NA
Capaian Kinerja				45,92

Sumber : Sekretariat Daerah dan BPKAD Kabupaten Mempawah, 2026

Tabel diatas menunjukkan realisasi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. NILAI SAKIP

Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP menunjukkan bahwa realisasi kinerja tahun 2025 belum dapat mencapai target yang ditetapkan, dimana target Nilai SAKIP tahun 2025 adalah BB sedangkan realisasi Nilai SAKIP masih pada predikat B dengan nilai 64,30 atau meningkat sebesar 1,23 poin dari tahun 2024. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP Kabupaten Mempawah sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Capaian nilai SAKIP ini diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB sesuai surat nomor B/137/AA.05/2025 tanggal 24 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.

Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
a. Perencanaan Kinerja	30	21,08
b. Pengukuran Kinerja	30	19,58
c. Pelaporan Kinerja	15	10,42
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,22
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B



Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian/evaluasi yang menggambarkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kemenpan RB tersebut di atas terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan implementasi SAKIP kedepannya, sebagai berikut :

**1. Komponen Perencanaan Kinerja
Rekomendasi perbaikan :**

- a. Melakukan reviu terhadap rumusan kondisi kinerja pada tujuan dan sasaran strategis, serta rumusan indikator kinerja di dalam RPJMD 2025-2029.
- b. Unit kerja perlu melakukan reviu terhadap rumusan kondisi kinerja tujuan dan sasaran strategis, serta rumusan indikator kinerja pada Renstra 2025-2029. Diharapkan perencanaan strategis di level PD sudah mempertimbangkan perencanaan kinerja berorientasi hasil dengan penetapan indikator kinerja yang SMART.
- c. Melakukan penetapan target kinerja dengan lebih spesifik pada besaran nilainya dengan mempertimbangkan baseline tahun 2024 dan satuan ukurnya, serta memastikan target bersifat progresif tiap tahunnya, sehingga pencapaian kinerja bisa lebih spesifik dan terarah.
- d. Instansi dan unit kerja perlu merumuskan kembali keterkaitan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan alur kerangka logis sehingga setiap level kinerja menunjukkan hubungan sebab–akibat yang jelas. Pohon kinerja yang disusun harus menggambarkan kontribusi setiap jenjang kinerjanya dengan baik, sehingga dapat menunjang efektivitas pencapaian kinerja.
- e. Mendorong identifikasi crosscutting kinerja lintas PD dengan memberikan gambaran kontribusi kinerja PD yang terlibat secara spesifik sehingga akan terlihat gambaran collaborative working yang berkualitas dalam strategi pencapaian kinerja.
- f. Menyelaraskan penyusunan rencana aksi dengan sasaran dan indikator kinerja strategis berupa aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dengan target triwulanan, sehingga setiap aktivitas yang direncanakan secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target outcome, bukan sekadar pelaksanaan program dan kegiatan administrative.

2. KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA

Rekomendasi Perbaikan :

- a. Mendorong proses pengukuran kinerja berkala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui pemanfaatan aplikasi SICANDA untuk seluruh PD sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan pengukuran kinerja secara berkala. Instansi dapat menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja berkala yang memanfaatkan aplikasi SICANDA untuk mengatur kewajiban setiap PD agar melaporkan kinerja berkalanya secara tertib.
- b. Melengkapi proses pengukuran kinerja dengan mewajibkan setiap PD menyampaikan uraian analisis capaian kinerjanya berupa analisis faktor pendorong/faktor penghambat pencapaian kinerja atas rencana aksinya untuk setiap triwulan.
- c. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam pemberian reward and punishment, serta perhitungan perolehan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada unit kerja untuk meningkatkan upaya pencapaian kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

3. KOMPONEN PELAPORAN KINERJA

Rekomendasi Perbaikan :

- a. Melakukan perbaikan informasi pada laporan kinerja pemda dengan melengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja secara mendalam, terutama analisis terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang baik.
- b. Memastikan laporan kinerja telah menyajikan analisis program/kegiatan yang lebih detil dalam mengungkapkan efektivitas program/kegiatan dalam menunjang capaian kinerja, serta memperdalam informasi upaya perbaikan strategi dalam pencapaian kinerja untuk periode berikutnya.
- c. Meningkatkan keseragaman kualitas pelaporan kinerja di level perangkat daerah dengan memastikan informasi pelaporan kinerja sudah sesuai dengan Permenpan 53/2014, terutama pada analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis program/kegiatan, dan analisis perbandingan kinerja/benchmarking kinerja.

4. KOMPONEN EVALUASI INTERNAL

Rekomendasi Perbaikan :

- a. Instansi disarankan memperkuat kapasitas evaluator internal dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai prinsip evaluasi berbasis hasil, cara membaca indikator, teknik analisis capaian, serta standar mutu evaluasi. Fokus evaluasi dapat didorong bukan hanya pada aspek pemenuhan, melainkan didorong juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan. Penguatan ini



penting agar proses evaluasi menghasilkan analisis yang valid dan dapat ditindaklanjuti.

- b. Memberikan rekomendasi evaluasi yang implementif berdasarkan setiap poin catatan evaluasi yang disampaikan, sehingga mempermudah setiap PD memahami dan menyusun langkah perbaikan kualitas SAKIP di unit kerjanya.
- c. Mendorong seluruh PD menyusun rencana aksi perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut evaluasi AKIP Internal tahun 2024. Selain itu, perlu dipastikan setiap proses perbaikan sudah sesuai dengan rekomendasi sehingga lebih berdampak pada perbaikan kualitas SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Capaian Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan belum dapat disajikan dikarenakan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2025 yang baru akan dimulai pemeriksaannya pada bulan Februari s.d Mei 2025.

Laporan Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeiksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) serta undang-undang terkait lainnya. Yang mana BPK telah memeriksa Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri dari Neraca Pemerintah Kabupaten Mempawah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan tahun 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dan laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan Laporan Nomor 18.A./LHP/XIX.PNK/5/2025 tanggal 22 Mei 2025.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Nilai SAKIP	63,71 (B)	63,07 (B)	64,30 (B)	78,65	77,86	91,85
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	NA	100	100	NA

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Nilai SAKIP mengalami peningkatan kinerja dari tahun 2024, hal ini didukung oleh adanya upaya-upaya perbaikan dokumen dan peningkatan koordinasi diantara Tim SAKIP. Begitu juga jika dilihat berdasarkan capaian Kinerjanya terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi dan capaian indikator Opini BPK telah mencapai target disetiap tahunnya, namun untuk di tahun 2025 masih belum dapat disajikan dikarenakan hasil pemeriksaan belum keluar.

h. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

IKU	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET JANGKA MENENGAH
Nilai SAKIP	Nilai	64,30	81,1
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kategori	NA	WTP

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi pada tahun 2025 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dan masih memerlukan



peningkatan Nilai SAKIP sebesar 16,8 point. Sedangkan untuk indikator Opini BPK masih belum dapat dibandingkan karena masih menunggu hasil evaluasi dari BPK.

i. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	64,30	NA
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	NA	NA

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Realisasi kinerja Nilai SAKIP dan Opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena target nasional tidak tersedia.

j. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

1. Nilai SAKIP

Faktor penghambat/hambatan/kendala pencapaian kinerja:

- Pemenuhan dokumen AKIP Perangkat Daerah di laman esr.menpan.go.id masih belum baik, masih banyak Perangkat Daerah yang belum lengkap dalam mengupload dokumen SAKIP di laman tersebut sebagai bahan evaluasi oleh evaluator.
- Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait perumusan sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome)
- Kurangnya pemahaman perangkat daerah terkait perumusan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART

upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran :

- Meningkatkan kolaborasi melalui koordinasi tim SAKIP
- Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan kinerja perangkat daerah dan perjanjian kinerja serta penyusunan dokumen AKIP lainnya.
- Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja.
- Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah

2. Opini BPK terhdap Laporan Keuangan

Penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan rekon yang sebelumnya masih belum bisa diterapkan bisa dilaksanakan, sehingga Laporan BMD bisa lebih terkontrol (khususnya pada tahun bersangkutan) dan meminimalisasi kesalahan atau perbedaan pencatatan dengan OPD terkait dengan laporan yang disampaikan saat pelaporan
- b. Tersediaanya jaringan yang bisa diakses secara online untuk setiap pengguna dalam menginput atau mencetak laporan yang dibutuhkan

Penyebab kegagalan/ penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Modal fisik sering dipenghujung tahun sehingga menyebabkan data yang diperlukan pengurus barang sebagai dasar pencatatan sering terlambat diperoleh dan menyebabkan saat melakukan rekon dan pelaporan mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan.
- b. History data aset yang lama dan banyak, membuat operator mengalami kesulitan saat melakukan update data karena membutuhkan waktu yang lebih lama saat melakukan input data.
- c. Pengurus barang yang masih merangkap tugas dan fungsi selain pengurus barang sehingga menyebabkan tidak konsisten didalam menyampaikan laporan sesuai target.
- d. Masih terdapat Pengurus barang yang belum memahami tugas dan fungsinya secara penuh sehingga memerlukan pendampingan ekstra.

Faktor Penghambat/Hambatan/Kendala Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian realisasi indikator Opini BPK, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Jadwal penyusunan APBD yang sempit sehingga SKPD masih ada yang terlambat menyampaikan RKA, kesalahan penempatan akun pendapatan dan



- belanja dalam usulan RKA, dan penentuan anggaran kas oleh SKPD yang belum sesuai.
2. Adanya perubahan regulasi yang sangat dinamis tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
 3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung perkantoran
 4. Sering terjadi perubahan regulasi menyebabkan adanya penyesuaian yang harus dilakukan dalam penyajian Laporan Keuangan.
 5. Terlalu banyaknya beban kerja ASN yang menangani penyusunan Laporan Keuangan OPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) di awal tahun yang menuntut penyelesaiannya pada waktu yang bersamaan, membuat PPK kewalahan untuk menyelesaikan tugas tersebut secara bersamaan akibatnya akan ada pekerjaan yang harus diselesaikan belakangan termasuk dalam penyusunan Laporan Keuangan.
 6. Masih kurangnya SDM yang terampil tentang IT di bidang akuntansi sehingga apabila terjadi kendala/masalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan aplikasi tidak bisa cepat ditangani karena harus meminta bantuan tenaga IT dari pihak luar atau bidang lain yang dalam waktu bersamaan sedang mengerjakan pekerjaan utamanya, serta kurangnya pemahaman terkait dengan proses akuntansi hingga menjadi laporan keuangan.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran adalah:

1. Perlunya melakukan inventarisasi secara berkala, terhadap Barang Milik Daerah setiap Pengguna Barang agar data yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
2. Melakukan Asistensi dan pelatihan untuk semua operator, Pengurus Barang dan Pengguna Barang.
3. Koordinasi dan komitmen semua pihak untuk bisa menyampaikan laporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Sarana dan prasarana pendukung seperti komputer atau laptop yang spesifikasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi
5. Melakukan penelusuran atas Aset yang sudah tidak bisa difungsikan untuk segera dilakukan usulan penghapusan sehingga lebih mengurangi history data aset yang banyak



6. Membuat jadwal sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pelaksanaan pekerjaan diluar jam kerja
7. Melakukan verifikasi RKA-SKPD, Menggunakan aplikasi terintegrasi dari perencanaan sampai penganggaran
8. Melakukan verifikasi dan pembahasan usulan PPAS, melakukan verifikasi terhadap usulan anggaran kas SKPD
9. Melaksanakan Pendidikan pelatihan dibidang Penatausahaan/Perbendaharaan
10. Melakukan Pembinaan di Organisasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan Penatausahaan keuangan Daerah
11. Mengajukan pengadaan staf baik untuk memenuhi keperluan di bidang IT maupun Akuntansi
12. Tetap menekankan pelaksanaan rekonsiliasi baik untuk Pendapatan, Belanja, dan Aset setiap bulan agar bisa mengurangi beban kerja di akhir dan awal tahun dalam penyusunan Laporan Keuangan
13. Terus membuka kesempatan bagi OPD untuk melakukan Coaching Clinic dalam penyusunan Laporan Keuangan agar nantinya OPD bisa menyusun Laporan Keuangan secara mandiri

k. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Meningkatnya penguatan birokrasi yang efektif dan efisien	Penunjang Urusan Program Pemda Kegiatan Penataan Organisasi	95.620.100	91.491.145	95,68	91,85	NA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	145.253.100.852	76.568.305.405	52,71		



		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	647.342.640	621.392.281	95,99		
Rata – Rata					81,46	91,85	NA

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran ini tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran ini tidak mencapai 100%.

I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk Meningkatkan penguatan birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK melalui berbagai program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Melaksanakan berbagai program penunjang urusan pemerintah daerah pada seluruh perangkat daerah yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta penyediaan dan penatausahaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, serta Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah.
3. Melaksanakan Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

m. Strategi dan upaya dalam meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun berikutnya

Beberapa langkah dan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan pencapaian kinerja pada sasaran ini antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar TIM SAKIP dalam meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
2. Melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah.



3. Mendorong perangkat daerah untuk melengkapi dokumen AKIP baik di aplikasi esr.menpan.go.id maupun dalam bentuk hardcopy guna memudahkan evaluator melakukan evaluasi.
4. Terus berupaya dalam meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dalam upaya meningkatkan impelentasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.

2.3.2.5. Sasaran 5 : " Meningkatkan Pelayanan Prima Kepada Publik"

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik" dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang cepat, professional dan efisien. Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Secara rinci Pencapaian sasaran ini:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	84,21	85,50	101,53
Capaian Kinerja					101,53

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, 2026



Berdasarkan tabel di atas Capaian kinerja sasaran dengan indikator kinerja tersebut mencapai 101,53%. Yang artinya indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Indeks kepuasan masyarakat didapat berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 39 yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat harus turut terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi. Salah satu peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat melalui penilaian pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan bentuk kerjasama antara Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah yaitu kompilasi dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.8.3.4 / 8781 / OR-B tanggal 27 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, Bagian Organisasi telah menginformasikan kepada Perangkat Daerah untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mengumpulkan laporan SKM perangkat daerah kepada Bagian Organisasi. Sebanyak 31 Perangkat Daerah dan 14 Puskesmas telah mengumpulkan laporan SKM, Bagian Organisasi melakukan kompilasi nilai pada Laporan SKM Perangkat Daerah sehingga mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah.

Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur yang harus dipenuhi agar tercipta nilai indeks kepuasan masyarakat yang memuaskan. Adapun 9 unsur tersebut terdiri dari :

1. Persyaratan : Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur : prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.



4. Biaya/Tarif *) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana : Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	83,78	84,66	85,50	-	-	101,53

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk capaian kinerja tidak dapat dibandingkan karena target indikator ini baru digunakan pada tahun 2025.



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Meningkatnya pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	85,50	NA

Berdasarkan tabel tersebut di atas indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini tidak digunakan untuk tahun berikutnya karena penetapan dokumen RPJMD yang baru.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasional
Meningkatnya pelayanan prima kepada publik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	85,50	NA

Target Nasional Indeks Kepuasan Masyarakat tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan pencapaian kinerja dapat dilakukan melalui Perangkat Daerah yang terus meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu peran Bagian Organisasi untuk memberikan pemantauan dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Adapun pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi terdiri dari aspek kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, keterbukaan dalam pelayanan publik baik melalui elektronik maupun nonelektronik, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Perangkat Daerah telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu saja, Perangkat Daerah



semestinya terus melakukan langkah tindak lanjut terhadap hasil survei kepuasan masyarakat agar kekurangan dalam pelayanan publik dapat segera diatasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka tercapainya target tersebut :

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dapat terdiri dari beberapa faktor. Perangkat Daerah tentunya harus memberikan pelayanan yang prima sehingga ketika perangkat daerah melakukan survei kepada penerima layanan, penerima layanan dapat memberikan penilaian survei yang baik. Selain itu, terkait dengan metode penilaian, Perangkat Daerah hendaknya perlu membuat pertanyaan pada kuesioner survei yang mudah dipahami oleh penerima layanan yang dapat berasal dari seluruh kalangan. Namun, tentunya pertanyaan tersebut harus sesuai dengan indikator/unsur yang harus dipenuhi dalam Indeks Kepuasan Masyarakat. Tidak hanya itu saja, bagi Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat dapat menggunakan metode survei yang bervariasi seperti menggunakan kuesioner, alat survei elektronik, survei online, maupun googlecrome.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penataan Organisasi	95.620.100	91.491.145	95,68	101,53	5,85
Rata – Rata				95,68	101,53	5,85



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,68% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101,53 %, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 5,85.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Guna mendukung pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan Kegiatan Penataan Organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah dalam peningkatan pelayanan publik dan tatalaksana.

Adapun program kegiatan yang perlu ditambahkan dalam pencapaian kinerja ini yaitu perlu dilakukannya kegiatan asistensi atau pendampingan dalam hal penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat terutama dalam menyusun kuesioner survei, mengolah dan menganalisis data survei, maupun publikasi dan tindaklanjut hasil survei.

h. Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dalam rangka peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mempawah yaitu dengan menetapkan Surat Keputusan Tim Pengelola Survei Kepuasan Masyarakat. Pembentukan tim pengelola Survei Kepuasan Masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pemanfaatan platform tunggal skm berbasis online dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga setiap Perangkat Daerah memiliki satu orang sebagai admin level 1 untuk mengelola SKM baik melaksanakan survei, analisis data maupun menyusun laporan survei. Dengan upaya pemanfaatan SKM berbasis online ini diharapkan dapat menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal.



2.3.2.6. Sasaran 6 : " Meningkatkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik"

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik". Keberhasilan sasaran ini diukur melalui capaian indikator Indeks SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna layanan. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan. Secara lebih rinci, pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks SPBE	Predikat	3,4	2,89	85
Capaian Kinerja Sasaran				85

Sumber : Diskominfo Kabupaten Mempawah, 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu berada pada Kategori "Baik", dengan capaian kinerja sebesar 85%.

Indeks tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah tahun 2025. Indeks SPBE memiliki 4 (empat) domain, antara lain :

1. Domain Kebijakan Internal (meliputi aspek : kebijakan tata kelola SPBE, kebijakan layanan SPBE).



2. Domain Tata Kelola SPBE (meliputi aspek : kelembagaan/penyelenggara SPBE, perencanaan dan strategi, Teknologi Informasi dan Komunikasi).
3. Domain Manajemen SPBE (meliputi aspek : penerapan manajemen, audit TIK).
4. Domain Layanan SPBE (meliputi aspek : layanan administrasi pemerintahan, layanan public).

Predikat penilaian SPBE terdiri dari :

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Berikut secara rinci hasil penilaian SPBE Kabupaten Mempawah Tahun 2025 :

Nama Indeks	Nilai
SPBE	2,89
Predikat SPBE	Baik
Domain Kebijakan SPBE	3,10
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,10
Domain Tata Kelola SPBE	2,10
Perencanaan Strategis	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Penyelenggaraan SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00



Pelaksanaan Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,95
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,17

Sumber: Diskominfo Kab.Mempawah, 2026

Berdasarkan Infografis implementasi SPBE, pada Tahun 2025 dari empat domain evaluasi, nilai tertinggi diperoleh dari domain kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE dan masih kurang di Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE. Beberapa hal yang mendukung peningkatan SPBE di Kabupaten Mempawah :

1. Domain Kebijakan SPBE

- a. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Mempawah.
- b. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Mempawah.

2. Domain Layanan SPBE

- a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Aplikasi ini digunakan dalam rangka digitalisasi produk hukum kabupaten mempawah, sehingga mudah diakses oleh masyarakat, dan dokumen hukum lebih terkelola sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Aplikasi ini dapat di akses di URL: <https://jdi.h.mempawahkab.go.id>
- b. SP4N Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), Aplikasi ini digunakan sebagai sarana layanan publik untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta permintaan informasi kepada Instansi terkait di Kabupaten Mempawah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, aplikasi ini juga dapat berfungsi sebagai Whistleblowing System (WBS) untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran, aplikasi ini dapat diakses melalui website, android/IOS, SMS. Aplikasi ini dapat di akses di URL : <https://www.lapor.go.id/>.



- c. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan aplikasi terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta telah terintegrasi di Pusat, aplikasi ini dapat di akses di URL : <https://sipd.kemendagri.go.id/>
- d. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), merupakan aplikasi umum berbagi pakai dalam rangka wujud transparansi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, dapat di akses di URL : <http://lpse.mempawahkab.go.id/>.
- e. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIM PBB), merupakan aplikasi layanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengecek serta mencetak bukti pembayaran PBB secara online, URL: <http://simpbb.mempawahkab.go.id/>.
- f. Aplikasi Pasien dan Aduan Mandiri (APAM), merupakan aplikasi layanan publik untuk mempermudah Masyarakat mendaftar di RSUD Rubini secara online melalui HP Android. Aplikasi ini dapat di download di Playstore.
- g. Aplikasi Layanan Kependudukan Online Mempawah (Silakom), aplikasi ini berada di kecamatan berguna untuk administrasi KTP, KK, KIA, dan Akta kependudukan. Aplikasi ini hanya bisa di akses dengan jaringan tertutup VPN.
- h. Aplikasi WBS (Whistle Blowing System) untuk pengaduan internal yang berkadar hukum. URL : <https://wbs.mempawahkab.go.id/>
- i. Aplikasi e-Sakip Review untuk mempercepat proses reviu, verifikasi dan evaluasi laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara digital, URL : <https://esr.menpan.go.id/>.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja : Indeks SPBE					
Realisasi (Tahun)			Capaian (%)		
2023	2024	2025	2023	2024	2025
2,61 (Baik)	2,73 (Baik)	2,89 (Baik)	74	77,77	85

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indeks SPBE mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Begitu juga dengan persentase capaian kerjanya.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
			2025	
Meningkatnya Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Predikat	2,89 (Baik)	3,3 (Baik)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 2,89 dengan kategori “Baik” masih dibawah target jangka menengah sebesar 3,3, dengan kategori “Baik”, atau perlu peningkatan nilai sebanyak 0,41 point untuk mencapai target pembangunan jangka menengah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Sasaran Strategis	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Indeks Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,89	3,00

Jika dibandingkan Indeks SPBE Kabupaten Mempawah Tahun 2025 2,89 dengan dengan Indeks SPBE Nasional Tahun 2025 3,00, maka Indeks SPBE Kabupaten Mempawah belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan nilai SPBE

Dalam penerapan SPBE masih ada domain yang belum maksimal, yakni domain tata kelola dan management SPBE, adapun kendala yang dihadapi dalam meningkatkan Indeks SPBE diantaranya adalah:

1. Diperlukan Koordinasi yang intens dengan Perangkat Pelaksana SPBE, agar pemahaman akan SPBE merata dan sinkron.



2. Perlunya disusun Peta Rencana SPBE yang perlu diselaraskan dengan muatan yang dimandatkan pada Perpres Nomor 95 Tahun 2018
3. Masih diperlukannya referensi dari Kab/Kota/Provinsi lain, tentang bagaimana kebijakan SPBE bisa berjalan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara menghadapi, karena kebijakan tersebut harus selaras dengan kebijakan SPBE pusat dan memerlukan sarana/prasarana pendukung serta sinergitas dari berbagai pihak terkait di Lingkungan, Kabupaten Mempawah mulai dari sisi perencanaan hingga penganggaran. Seperti :
 - a. Diperlukannya Anggaran untuk maintenance/ peremajaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh Perangkat Daerah, untuk mendukung keberlanjutan eGov di Kabupaten Mempawah.
 - b. Perlunya Sarana dan Prasarana yang mendukung keamanan implementasi SPBE Kabupaten Mempawah, bisa dikatakan pengamanan/ security website masih lemah, karena kurangnya dukungan penganggaran di bidang persandian. Mulai dari hardware dan software pendukung keamanan aplikasi dan jaringan. Padahal hal ini sangat penting untuk mencegah kebocoran data, peretasan, dan kerusakan aset TI berbasis system elektronik.
 - c. Keterbatasan SDM juga menjadi kendala, karena di era digitalisasi ini mutlak diperlukan talenta-talenta digital yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah untuk kemudahan kolaborasi dan Implementasi SPBE.
 - d.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan	Aplikasi Informatika	100.080.722	100.080.722	100	85	Na



n Berbasis elektronik (SPBE)	Informasi dan Komunikasi Publik	5.522.230	5.522.230	100		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	7.122.500	7.122.500	100		
	Penyelenggaraan Sektoral	5.733.900	5.733.900	100		
Rata – Rata				100	85	Na

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 85 %, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat di hitung karena capaian kinerjanya tidak mencapai 100%.

j. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan program yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Program Aplikasi Informatika yang mendukung pemantauan ketersediaan (availability) jaringan intra kabupaten, dengan menggunakan aplikasi monitoring jaringan. Dengan program ini pula dapat terselenggaranya layanan aplikasi yang online terintegrasi.
2. Program informasi dan komunikasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat untuk mengakses layanan pengaduan/informasi pemerintah daerah.
3. Program penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan provinsi terkait keamanan.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang bertujuan untuk menyelenggarakan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.



k. Strategi /langkah untuk meningkatkan Capaian Kinerja pada Tahun Berikutnya

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai SPBE diantaranya:

1. Melakukan Evaluasi Tahunan dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE
2. Penyusunan Peta Rencana SPBE
3. Berkoordinasi dengan operator OPD untuk mengedukasi, mensupport dan mengatasi kendala teknis dilapangan dalam rangka implementasi SPBE
4. Melakukan Monitoring, manajemen dan maintenance Jaringan Intra OPD secara harian, agar fungsi aplikasi layanan SPBE tetap berjalan sebagaimana mestinya
5. Meningkatkan kualitas SDM IT dengan terus mengikuti kursus gratis secara online untuk mendapatkan sharing knowledge dari pihak ketiga maupun pemerintah pusat
6. Memaksimalkan pemanfaatan Aplikasi Pusat yang mendukung SPBE.

2.3.2.7. Sasaran 7 : " Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah"

Sasaran ini mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing. Pencapaian sasaran ini diukur dengan PDRB Perkapita dan Rasio PAD terhadap Pendapatan. PDRB per Kapita adalah Nilai Produk Domestik Regional Bruto dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Rasio PAD terhadap Pendapatan merupakan formula yang digunakan untuk menganalisis atau menghitung perbandingan kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam pola hubungan dengan pemerintah pusat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	--------	--------	-----------	---------



PDRB Perkapita***	Rp.juta	40.868	43.156	105,60
Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	15,18	16,56	109,09
Capaian Kinerja Sasaran				107,34

Sumber : 1. Bapperida Kab. Mempawah, 2026
2. BPPRD Kab.Mempawah, 2026

Ket : ***Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Sekor Unggulan Daerah”** menunjukkan capaian kinerja sasaran ini mencapai 107,34%. Secara lebih rinci, pencapaian indikator di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. PDRB Perkapita

Pada tahun 2025, RPD Tahun 2025-2026 PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Mempawah ditargetkan sebesar 40,868 Juta Rupiah. Kemudian dengan posisi angka yang sangat sementara, realisasi PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku tahun 2025 sebesar 43.156 Juta Rupiah dengan persentase capaian sebesar 105,60%. Tercapainya realisasi target PDRB Per Kapita Atas Dasar harga berlaku Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat dilihat dari kompeten pembentuk PDRB PerKapita atas harga berlaku yaitu Nilai PDRB atas Harga Berlaku dan Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah. Pada tahun 2025 PDRB sebesar 13.837,04 Miliar Rupiah dan tahun 2024 sebesar 12.512,59 Miliar Rupiah atau tumbuh sebesar 10,58 %. Sementara dari sisi jumlah penduduk, pada tahun 2025 sebesar 320.630 jiwa dan tahun 2024 sebesar 316.728 jiwa atau tumbuh sebesar 1,23 %. Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

Realisasi kinerja dari indikator tersebut diperoleh berdasarkan data sekunder yang disediakan oleh BPS Kabupaten Mempawah/BPS Provinsi Kalimantan Barat baik dalam publikasi “Kabupaten Mempawah Dalam Angka” atau “Provinsi



Kalimantan Barat Dalam Angka” yang dihitung dengan membandingkan PDRB terhadap jumlah penduduk pada tahun tertentu.

Sebagai salah sektor pendukung PDRB ialah Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sektor Perkebunan, Sektor Peternakan dan Sektor Perikanan.

Kontribusi Sub Sektor Pertanian dalam mendukung PDRB Perkapita terdiri atas :

a. Capaian Kontribusi Sub Sektor Pertanian Dalam Mendukung PDRB Perkapita

Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025

No	Komoditi	Produksi (Ton)		Bertambah / Berkurang (Ton)	%
		2024	2025		
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
1	Padi	57.137,15	68.118,00	10.980,85	19,22
2	Jagung	1.383,86	1.482,00	98,14	7,09
3	Ubi Kayu	16.483,67	12.225,00	-4.258,67	-25,84
4	Ubi Jalar	310,22	203,30	-106,92	-34,47
5	Keladi	1.364,00	1.635,00	271,00	19,87
6	Sayuran Buah Semusim	6.306,00	3.214,00	-3.092,00	-49,03
7	Tanaman Buah Tahunan	157.018,00	76.845,00	-80.173,00	-51,06
8	Tanaman Biofarmaka	8.806,84	6.896,28	-1.910,56	-21,69
Jumlah		248.809,74	170.618,58	-78.191,16	-31,43

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas produksi tanaman pangan dan hortikultura tertinggi yaitu tanaman buah tahunan sebanyak 76.845 Ton disusul dengan produksi Padi sebanyak 68.118 Ton. Sedangkan produksi terendah yaitu ubi jalar sebanyak 203,30 Ton.

b. Capaian Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Dalam Mendukung PDRB Perkapita

Tabel Produksi Perkebunan Tahun 2025

No	Komoditas	PRODUKSI PERKEBUNAN (Ton)			
		2024	2025	Bertambah / Berkurang	%
1	2	3	4	5	6
1	Karet	3.394,61	3.312,23	-82,38	-2,43
2	Kelapa Dalam	17.300,79	17.258,10	-42,69	-0,25
3	Kelapa Hybrida	449	446,48	-2,52	-0,56



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

4	Kelapa Deres	1.399,30	1.388,79	-10,51	-0,75
5	Kopi	177,3	176,3	-1,00	-0,56
6	Lada	49,5	48,49	-1,01	-2,04
7	Kakao	106,2	112,3	6,10	5,74
8	Kelapa Sawit	39.730,05	37.056,70	-2.673,35	-6,73
9	Pinang	269,4	276,42	7,02	2,61
JUMLAH		62.876,15	60.075,81	-2.800,34	-4,45

Sumber Data : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas produksi perkebunan tertinggi yaitu kelapa sawit sebanyak 37.056,70 Ton disusul dengan produksi kelapa dalam sebanyak 17.258,10 Ton. Sedangkan produksi terendah yaitu lada sebanyak 48,49 Ton.

c. Capaian Kontribusi Sub Sektor Peternakan Dalam Mendukung PDRB Perkapita

Jumlah Populasi Ternak

No	Komoditas	PRODUKSI DAGING TERNAK (Ton)
1	Sapi Potong	51.681
2	Kambing	92.849
3	Domba	506
4	Babi	9.457
5	Ayam Buras	1.299.226
6	Ayam Ras Petelur	827.448
7	Ayam Ras Pedaging	7.479.461
8	Itik	200.249
9	Burung Puyuh	94.571
10	Itik Manila	17.053

Berdasarkan tabel di atas jumlah populasi ternak tertinggi yaitu Ayam Ras Pedaging sebanyak 7.479.461 Ton disusul dengan Ayam Buras sebanyak 1.299.226 Ton. Sedangkan produksi terendah yaitu domba sebanyak 506 Ton.

d. Capaian Kontribusi Sub Sektor Perikanan Dalam Mendukung PDRB Perkapita

Data Produksi Pembesaran Karamba Jaring Apung Tahun 2025

No.	Jenis Ikan	Produksi KJA (Kg)				
		Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Triwulan I	Jumlah



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

Air Tawar						
1	Bawal	2.140	2.170	2.076	2.010	8.396
2	Jelawat	1.535	1.555	1.452	1.441	5.983
3	Lele	36.511	30.342	35.168	28.568	130.589
4	Mas, Karper	285.619	301.662	289.844	299.205	1.176.330
5	Nila	460.049	461.828	468.927	461.851	1.852.655
6	Patin	21.313	20.712	20.922	19.797	82.744
Payau						
1	Udang Vaname	87.562	88.473	95.967	95.664	367.666
Total		894.729	906.742	914.356	908.536	3.624.363

Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2025 sebesar 34.348,95 Ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 3.622,72 Ton, terdapat peningkatan sebesar 726,23 Ton atau 20,05%. Hal ini dikarenakan usaha budidaya ikan meningkat, serta keterampilan pembudidaya ikan juga semakin meningkat.

Selain produksi pembesaran, budidaya ikan di Kabupaten Mempawah juga bergerak di sektor pembenihan, pada tahun 2025 produksi benih ikan sebesar 27.972.000 ekor, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 14.975.000 ekor terdapat peningkatan sebesar 12.997.000 ekor atau -86,79%.

Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025

No	Tahun	Produksi Peairan Umum (Ton)	Produksi Laut (Ton)	Jumlah (Ton)
1	2	3	4	5
1	2019	562,99	12.211,00	12.773,99
2	2020	624,48	10.683,22	11.307,70
3	2021	640,88	184.935,00	185.575,88



4	2022	847,24	10.563,31	11.410,55
5	2023	868,99	11.757,01	12.626,00
6	2024	809,78	17.889,54	18.699,32
7	2025	713,48	17.890,14	18.603,62

Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2025 sebesar **18.603,62** Ton jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 18.699,32 Ton, terdapat penurunan sebesar -95,70 Ton atau -0,51%. Produksi Perikanan Tangkap terdiri atas Produksi Perikanan Tangkap di Laut sebesar 17 890,14 Ton dan Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum sebesar 713,48 Ton. Penurunan produksi Pada Perairan Umum dimana usaha penangkapan ikan di perairan umum sebagian besar bukan merupakan pekerjaan utama, melainkan pekerjaan sampingan. Sehingga nelayan perairan umum tidak setiap hari melakukan penangkapan ikan.

2. Rasio PAD terhadap Pendapatan

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD sebesar 16,56% atau capaian kinerja sebesar 109,09%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 15,18% maka realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian rasio tersebut didapat dari hasil perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.084.908.228.455,61,- dengan total Pendapatan APBD tahun 2025 sebesar Rp. 1.079.701.907.780,60.

Rasio PAD terhadap merupakan formula yang digunakan untuk menganalisis atau menghitung perbandingan kemandirian atau kemampuan suatu daerah dalam pola hubungan dengan pemerintah pusat. Dalam formulasinya, membandingkan antara komponen jumlah PAD yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah dengan keseluruhan pendapatan daerah pada tahun yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap total pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semakin tinggi Rasio Pendapatan Asli Daerah



terhadap APBD, maka semakin besar kemandirian keuangan daerah. Ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program-programnya sendiri tanpa bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Secara rinci Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2025**

No	Jenis PAD	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		184.821.254.153	179.701.907.706,12	97,23
1	Hasil Pajak Daerah	113.341.014.706	95.624.374.194,75	84,36
1	Pajak Reklame	1.850.000.000	1.329.378.825	71,85
2	Pajak air Tanah	560.000.000	476.383.500	85,06
3	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	1.305.000	4,35
4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	2.655.369.633,75	88,51
5	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40.000.000.000	34.517.258.151	86,29
6	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.000.000.000	13.366.915.078	74,26
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	26.643.616.900	25.581.174.307	96,01
2	Hasil Retribusi Daerah	53.504.099.600	67.485.258.391,19	126,13
1	Retribusi Jasa Umum	47.070.500.000	65.049.487.036,19	138,19
2	Retribusi Jasa Usaha	864.000.000	506.762.360	58,65
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.569.599.600	1.929.008.995	34,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.379.837.294	6.379.837.294	100
4	Lain-lain PAD yang Sah	11.596.302.553	10.212.437.900,66	88,06

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa komponen PAD yang dapat melampaui target antara lain retribusi jasa umum dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025



PDRB Perkapita	34.254	39.506	43.156	106,21	156,24	105,60
Rasio PAD terhadap Pendapatan	13,89	12,32	16,56	94,17	99,14	109,09

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator PDRB Perkapita dan Rasio PAD terhadap pendapatan untuk tahun 2025 Pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
			2025	
Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	Rp.juta	43.156	55,02
	Rasio PAD terhadap pendapatan	%	16,56	NA

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2025 PDRB perkapita masih belum mencapai target jangka menengah. Sedangkan untuk indikator Rasio PAD terhadap pendapatan sebesar 16,65% namun tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator ini tidak ditargetkan pada tahun berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	PDRB Perkapita	43.156	NA
	Rasio PAD terhadap pendapatan	16,56	NA



Tidak terdapat target nasional untuk kedua indikator di atas tersebut.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor Penghambat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat. Adapun permasalahan – permasalahan antara lain :

- a. Kurangnya koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan peraturan daerah terkait perpajakan;
- b. Masih terdapat partisipasi masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran WP terhadap kewajiban perpajakan;
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pajak daerah dan kurangnya SDM IT yang kompeten
- d. Sistem yang dimiliki BPPRD belum dapat mengakses data penerimaan secara real-time sesuai dengan konsep Undang-Undang keuangan negara;
- e. Belum ada SOP dan keterbatasan SDM penilai untuk pendataan;
- f. Adanya redudansi data, database tidak terintegrasi ketika terjadi perubahan, belum berbasis peta digital dan penguasaan teknologi informasi dan GIS belum merata;
- g. NJOP belum diperbaharui secara berkala sehingga tertinggal dari perkembangan nilai pasar sementara ada keterbatasan data transaksi dan survei harga pasar tanah dan bangunan;
- h. Potensi penghindaran pajak dalam transaksi jual beli
- i. Masih ada objek pajak baru yang belum terdata sebagai WP, adanya potensi kesalahan penetapan SPPT serta keterbatasan SDM dan sistem pendukung penetapan wajib pajak;
- j. Keterbatasan sarana fisik dan infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal menghambat efisiensi pelayanan;
- k. Munculnya rumor di masyarakat tentang prosedur administrasi perpajakan



daerah yang dianggap rumit, juga sebagai efek implementasi pajak di daerah lain sehingga turunnya kepercayaan masyarakat kepada petugas pajak di Kabupaten Mempawah;

- l. Keterlambatan penyampaian data dari OPD pengampu retribusi dalam pelaporan serta ketidaksinkronan data OPD dengan Bendahara Umum daerah (BUD) yang tidak didukung pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi;
- m. Ketidakmampuan finansial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, dapat menyebabkan tunggakan pajak yang terus menumpuk;
- n. Kuantitas dan kualitas jurusita pajak yang belum optimal, termasuk kurangnya pelatihan khusus dapat menghambat pelaksanaan tindakan penagihan
- o. Masih terdapat data yang belum update terkait jumlah piutang, alamat objek pajak dan data objek pajak sehingga masyarakat enggan membayar.
- p. Keberatan sering didasarkan pada ketidaksepakatan subjektif tanpa dasar aturan atau pasal undang-undang yang kuat dan melewati tenggat waktu 3 bulan sejak SKPD diterbitkan;
- q. Penyediaan karcis retribusi terkendala pada keakuratan kebutuhan karcis dan tidak memadainya mesin porporasi untuk keabsahan alat pemungutan;
- r. Adanya kendala implementasi roadmap elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dikarenakan regulasi yang belum komprehensif, infrastruktur terbatas, literasi digital masyarakat yang rendah, serta tantangan keamanan siber.

Strategi Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan pada masalah dan tantangan yang dihadapi tersebut diatas, maka mempertimbangkan untuk melakukan langkah - langkah sebagai berikut;

- a. Melakukan monitoring dan pengendalian dari berbagai OPD yang mendukung kinerja pencapaian PDRB Per Kapita. Monitoring dilakukan dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang menjadi akar masalah yang menghambat pencapaian target PDRB Per Kapita. Hasil dari monitoring tersebut akan dilakukan pengendalian sesuai dengan tugas dan wewenang OPD yang mendukung pencapaian PDRB Per Kapita.
- b. Meningkatkan komunikasi antar pihak yang terkait dan terus melakukan umpan balik secara teratur dan konstruktif.



- c. Melakukan pendekatan partisipatif dan melakukan perbaikan administrasi dan penegakan hukum yang lebih optimal, memperbanyak kegiatan sosialisasi ke WP, melakukan pemutakhiran data, memperkuat pengawasan alat perekam data transaksi serta melakukan kegiatan pemeriksaan.
- d. Melakukan pengembangan sistem inti penerimaan dan pengelolaan pajak daerah dan penambahan menu untuk mengintegrasikan data yang akan digunakan dalam mengelola data keuangan secara lebih baik dan akurat serta perlunya tambahan SDM yang berkompeten di bidang aplikasi pajak daerah.
- e. Menerapkan compliance risk manajemen (CPM) dengan menggunakan pendekatan manajemen resiko untuk mengidentifikasi area-area dengan potensi ketidak-akuratan data atau mengembangkan sistem menjadi penerimaan secara real-time.
- f. Membuat rancangan SOP pendataan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan terbaru
- g. Integrasi data dengan instansi teknis (ATR/BPN, Dinas PUPR, Disdukcapil)
- h. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis penilai
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis.
- j. Perencanaan database, penerapan kontrol internal dalam proses input dan perubahan data, normalisasi database, bekerjasama dengan pihak ke 3 dalam pengembangan system pelayanan pajak daerah.
- k. Melakukan penilaian massal secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian individual untuk objek pajak nonstandard serta pengumpulan data harga pasar melalui survei lapangan dan transaksi BPHTB.
- l. Penggunaan NJOP, ZNT, dan data pembanding sebagai alat uji kewajaran
- m. Pendataan aktif objek pajak baru, optimalisasi sistem informasi serta digitalisasi proses penetapan dan perubahan wajib pajak.
- n. Peremajaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pelayanan.
- o. Memperbanyak sosialisasi tentang kemudahan pelayanan dan pembayaran pajak kepada masyarakat dan memperbanyak iklan masyarakat yang menarik tentang perpajakan.
- p. Penetapan batas waktu pelaporan yang jelas dan mengikat, rekonsiliasi data secara berkala dengan BUD, penguatan dan integrasi sistem informasi PAD.
- q. Memberikan insentif pajak bagi masyarakat menengah kebawah maupun bagi



wajib pajak yang taat pajak.

- r. Perlu adanya pelatihan dan pelantikan jurusita guna melancarkan kegiatan penagihan hingga ke tahap paling akhir.
- s. Perlu dilakukan kegiatan pendataan massal seperti sensus pajak untuk mendapatkan data yang lebih update dan selanjutnya perlu dilakukan penilaian massal agar NJOP mendekati harga pasar untuk meningkatkan PAD.
- t. Perlunya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta tata cara pengajuan proses keberatan yang efektif, dan transparansi proses dan prosedur keberatan.
- u. Identifikasi ulang kebutuhan penyediaan karcis pada OPD pengampu retribusi dan mengajukan usulan anggaran belanja pemeliharaan mesin porporasi karcis untuk peremajaan sarana dan prasarana.
- v. Efektifitas tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD), penguatan regulasi dan koordinasi, pembentukan sinergi antar lembaga, penyempurnaan sistem informasi, dan integrasi sistem seperti SIMDA keuangan dengan sistem pembayaran (QRIS, e-banking).

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Sektor Unggulan	Penigkatan diversifikasi dan ketahanan	106.476.000	106.471.200	99,95	107,64	19,26



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

Daerah	pangan masyarakat					
	Perikanan pengelolaan perikanan tangkap	1.335.073.300	43.932.646	3,30		
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	370.827.500	365.275.787	98,50		
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.518.343.300	995.454.765	65,56		
	Pengelolaan perikanan budidaya	142.179.737	140.939.947	99,12		
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100.000.000	99.830.600	99,83		
	Penyuluhan pertanian	1.289.452.300	1.267.849.765	98,32		
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	119.532.500	115.996.708	97,04		
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	412.136.620	407.337.176	98,83		
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	53.498.212	52.036.981	97,26		
	Perencanaan dan pembangunan industri	350.951.600	349.989.534	99,72		



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	15.491.100	15.400.279	99,41		
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	11.885.100	11.813.817	99,40		
	Pengembangan kebudayaan	2.557.644.000	2.549.310.496	99,67		
	Pengembangan kesenian tradisional	348.478.500	347.600.305	99,74		
	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1.162.315.040	209.229.289	18		
	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	415.300.000	413.067.674	99,46		
	Pemasaran pariwisata	373.361.750	373.133.042	99,94		
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	32.804.100	32.327.282	98,54		
	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	36.196.900	33.145.760	91,57		
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	46.068.852	38.733.484	84,07		
	Pengelolaan pendapatan daerah	1.846.750.316	1.794.195.707	97,15		
Rata – Rata				88,38	107,64	19,26



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 88,38% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107,64%, Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 19,26.

Berdasarkan hasil perbandingan antara pagu anggaran pada tahap APBD murni tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 12.341.814.520 dengan tahap pergeseran APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebesar 11.060.966.311 diperoleh informasi terdapat beberapa program mengalami peningkatan dan penurunan serta tidak ada penambahan pagu dalam mendukung kinerja peningkatan PDRB Perkapita. Secara keseluruhan terdapat penurunan pada pagu program pendukung peningkatan kinerja Per Kapita sebesar 10,38 %. Penurunan pada pagu program pendukung peningkatan kinerja PDRB Per Kapita disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal Februari 2025 tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Didalam RPD 2025-2026 telah diidentifikasi program-program yang mendukung pencapaian kinerja PDRB Per Kapita namun dalam proses penganggaran masih terdapat beberapa program yang belum dapat diakomodir dalam APBD seperti program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal dan program pengembangan UMKM yang menunjukkan bahwa pada tahap APBD induk 2025 sudah tidak terdapat alokasi anggaran. PDRB per Kapita terbentuk komponen PDRB yang berhubungan dengan program yang tidak mendapat alokasi anggaran dalam APBD yaitu komponen investasi. Dengan alokasi pada program pengembangan iklim penanaman modal dan program promosi penanaman modal diharapkan akan mengakselerasi kinerja investasi di Kabupaten Mempawah yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai PDRB dan PDRB Per Kapita. Sementara dari PDRB sisi lapangan usaha, progrsm pengembangan UMKM diharapkan akan mengakselerasi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran,



reparasi mobil dan sepeda motor yang merupakan lapangan usaha yang menggambarkan perkembangan UMKM sehingga selanjutnya akan mempengaruhi nilai PDRB dari sisi lapangan usaha. Keseluruhan kegiatan tersinergi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemampuan kemandirian daerah.

Strategi/langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya :

1. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan usaha di Kabupaten Mempawah
2. Mendorong sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi dan nilai tambah yang besar terhadap PDRB yang berbasis pada sektor unggulan
3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB).
4. Meningkatkan penyediaan, penerapan dan penegakan regulasi perpajakan yang komprehensif, jelas dan berkeadilan.
5. Memperluas jangkauan pelayanan langsung/tatap muka dengan inovasi monil pelayanan keliling (Jempol Pakde=Jemput Bola Pajak Daerah).
6. Meningkatkan pendataan subjek, objek dan wajib pajak daerah secara partisipatif dengan inovasi sitem layanan elektronik pajak daerah di desa (Sile Pak Kades).
7. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD serta
8. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder yang berpengaruh dalam pengelola pendapatan asli daerah.

2.3.2.8. Sasaran 8 : " Menurunnya Kemiskinan"

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Meningkatnya Kemandirian Daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing. Pencapaian sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator Tingkat Kemiskinan dan Indeks Gini Rasio.

Secara rinci capaian kinerja sasaran ini diukur melalui tabel capaian indikator sebagai berikut:



a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	%	4,39	4,49	97,77
2.	Tingkat Inflasi	%	3,32	2,16	134,94
Capaian Kinerja Sasaran					116,35

Sumber : 1. Dinas Sosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2026
2. Bapperida Kab. Mempawah, 2026

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 2 (dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 48,88%. Rendahnya persentase capaian kinerja pada sasaran ini disebabkan oleh belum rilisnya indikator Tingkat Inflasi oleh BPS. Pencapaian indikator sasaran **“Menurunnya Kemiskinan”** dijelaskan berikut ini :

1) Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tabel di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator Tingkat Kemiskinan menunjukkan capaian kinerja sasaran ini masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar **97,79%**, dimana dari target sebesar 4,39% dan terealisasi sebesar 4,49%.

Pengertian angka kemiskinan Konsep yang dipakai BPS adalah;

- a. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach)
- b. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)
- c. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan

Indikator Kemiskinan Menurut SUSENAS Susenas Konsumsi/Pengeluaran ;



- a) Menghitung indikator pokok kemiskinan seperti persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2).
- b) Informasi data konsumsi/pengeluaran dari ratusan komoditi makanan dan bukan makanan.
- c) Komoditi makanan dapat dikonversi ke zat gizi kalori, protein, lemak.
- d) Diperoleh konsumsi/pengeluaran rumah tangga (ruta) maupun kapita/individu.

2) Tingkat Inflasi

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah, realisasi tingkat inflasi tahun 2025 tercatat sebesar 2,16 persen, sehingga capaian tersebut berada dibawah target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Mempawah selama tahun 2025 relatif terjaga, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan lebih rendah dari sasaran yang direncanakan. Rendahnya realisasi inflasi ini dipengaruhi oleh upaya pengendalian harga melalui pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga di wilayah Kabupaten Mempawah.

Tingkat inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang menunjukkan penurunan daya beli mata uang. Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.

Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan laju inflasi berdasarkan PDB Deflator Kabupaten Mempawah yang mengukur perubahan harga rata-rata seluruh barang dan jasa baru yang diproduksi secara domestik dalam suatu periode, dibandingkan tahun dasar. Untuk mencerminkan tingkat inflasi secara luas karena mencakup barang modal dan konsumsi. Pada tahun 2025 perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% dengan PDB atas harga berlaku



mencapai Rp23.821.1 triliun. Deflator PDB memastikan bahwa pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan volume produksi yang sebenarnya, bukan hanya kenaikan harga. Komponen Utama yang membentuk perhitungan Dflator PDB adalah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negeri, yang terbagi ke dalam empat kategori pengeluaran utama yang meliputi :

1. Konsumsi Rumah Tangga (C-Consumption): Pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang dan jasa (makanan, pakaian, jasa kesehatan, dll).
2. Investasi (I-Investment): Pengeluaran untuk modal fisik, seperti mesin, konstruksi bangunan, dan perubahan inventaris perusahaan.
3. Pengeluaran Pemerintah (G-Government Spending): Pembelian barang dan jasa oleh pemerintah (gaji PNS, pembangunan infrastruktur).
4. Ekspor Net (NX- Net Exports): Selisih antara nilai ekspor (X) dan impor (M).

Data inflasi memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, antara lain:

1. Pedoman kebijakan moneter (Bank Indonesia menggunakan data inflasi sebagai acuan untuk menetapkan suku bunga acuan (BI-Rate) guna mencapai sasaran inflasi).
2. Perencanaan pembangunan dan APBN (data inflasi digunakan sebagai asumsi makro dalam penyusunan APBN dan dokumen perencanaan (RPJMN/RKP)).
3. Mengukur daya beli masyarakat (tingkat inflasi yang rendah dan stabil membantu menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh kenaikan harga).
4. Evaluasi kinerja pengendalian (TPID) (digunakan oleh TPID untuk memantau efektivitas program, seperti operasi pasar murah, sidak, dan menjaga stok bahan pokok).
5. Penyesuaian pendapatan dan kontrak (inflasi sering digunakan sebagai acuan penyesuaian upah, gaji, serta kontrak bisnis jangka panjang).
6. Indikator stabilitas ekonomi (menunjukkan kondisi kesehatan perekonomian secara makro; inflasi yang stabil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan).



b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan	5,21	4,83	4,49	85,75	78,03	97,77
Tingkat Inflasi	2,09	1,58	2,16	-	-	134,94

Penurunan angka kemiskinan dengan target 4,43%, merupakan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2025, dan pada tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025 angka Kemiskinan Kabupaten Mempawah turun dari tahun 2024 sebesar 4,83 % dan tahun 2025 sebesar 4,49 % atau turun sebanyak 0,34 %. Penurunan angka kemiskinan disebabkan semakin baiknya kemampuan warga masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan karena harga-harga kebutuhan pokok, dan angka pengangguran yang semakin menurun dikarenakan semakin meningkatnya investasi dan pembangunan pabrik-pabrik.

Perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah yang menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat dikarenakan berbagai peningkatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Mempawah seperti menciptakan lapangan pekerjaan, intensifikasi bidang Pertanian dll.

Sedangkan Tingkat Inflasi di Kabupaten Mempawah selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis, seiring dengan tren yang juga terlihat pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Berdasarkan tabel di atas bahwa pada tahun 2023 Inflasi di Kabupaten Mempawah sebesar 2,09 dan turun pada tahun 2024 menjadi 1,58. Secara keseluruhan, meskipun pernah terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022, Kabupaten Mempawah menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengendalikan inflasi, terutama pada dua tahun terakhir ini.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
			2025	
Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	4,49	4,65
	Tingkat Inflasi	%	2,16	-

Berdasarkan tabel di atas, realisasi pada tahun 2025 Tingkat Kemiskinan sebesar 4,49 dengan target jangka menengah sebesar 4,65, maka realisasi indikator tersebut di atas sudah melampaui dari target jangka menengah.

d. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	4,49	8,47
	Tingkat Inflasi	2,16	2,5

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa Angka Kemiskinan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 sebesar 4,49 lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 8,47%. Persentase penduduk miskin (Headcount Index/PO) adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Presentase penduduk miskin disuatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan disuatu wilayah juga tinggi. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, penduduk miskin di Kabupaten Mempawah konsisten dibawah 5,32 %. Pada tahun 2025 turun sebesar 4,49 % atau sebanyak 12 ribu penduduk dan apabila dikomparasikan, angka kemiskinan Kabupaten Mempawah selalu lebih rendah dibandingkan angka nasional.

Pada tahun 2025, realisasi tingkat inflasi Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 2,16 persen, sedangkan target nasional berada pada angka 2,5 persen. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, target nasional inflasi menggunakan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat inflasi atau deflasi di tingkat konsumen, yang mencerminkan perubahan harga paket barang/jasa yang dibayar masyarakat. Saat ini,



penghitungan IHK di Indonesia menggunakan tahun dasar 2022=100 berdasarkan hasil Survey Biaya Hidup (SBH) dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Sedangkan tingkat inflasi di Kabupaten Mempawah Pemerintah menggunakan Deflator PDB sebagai pengukur inflasi secara menyeluruh. Untuk target nasional angka 2,5 merupakan hasil target tingkat inflasi berdasarkan IHK sedangkan untuk kabupaten mempawah untuk tahun 2025 masih menunggu data yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan Deflator PDB.

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Mempawah secara mandiri belum ditetapkan sebagai kota sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional. Berikut beberapa alasan belum memiliki IHK mandiri:

- Penyampelan Kota IHK berdasarkan representasi: BPS menetapkan kota-kota sampel IHK berdasarkan tingkat konsumsi, jumlah penduduk, dan perannya dalam perekonomian regional. Tidak semua kabupaten/kota di Indonesia dihitung IHK-nya.
- Penggunaan data regional: Inflasi Kabupaten Mempawah tercermin dari angka inflasi gabungan kota-kota di Kalimantan Barat. Meskipun begitu, data perdagangan dan harga di Mempawah tetap terpantau.
- Perluasan cakupan kota IHK secara nasional : Meskipun BPS telah menambah cakupan IHK ke 150 kabupaten/kota pada tahun 2024 untuk membuat data inflasi lebih representatif, namun sampai dengan tahun 2025 belum seluruh kabupaten/kota ditetapkan sebagai kota sampel, termasuk Kabupaten Mempawah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah dalam hal ini menyangkut peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kabupaten Mempawah yaitu adanya komitmen yang tinggi untuk mengurangi angka



kemiskinan dengan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, transparan serta tepat sasaran.

Solusi yang dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSM, TKSK, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga). Membangun Lembaga Pelayanan dan Perlindungan Sosial Terpadu untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penjangkauan penduduk miskin Kabupaten Mempawah dapat mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan yaitu Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), melaksanakan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat.

upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan yaitu menganalisa kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), melaksanakan updating data penduduk miskin serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin.

3. Strategi/ Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya
 - a. Melaksanakan peningkatan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - b. Meningkatkan Kapasitas Potensi Lembaga pelayanan bagi masyarakat Miskin yaitu Sistim Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan ketepatan dan kecepatan penjangkauan penduduk miskin Kabupaten Mempawah dapat mengakses lebih banyak program penanggulangan kemiskinan.
 - c. Melakukan updating data kemiskinan agar pemberian bantuan tepat sasaran.

Memberikan Pelayanan Kesejahteraan Sosial semaksimal mungkin terutama pada SPM Bidang Sosial dengan cara memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin serta memberikan bantuan sosial bagi korban bencana.

Sedangkan Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja indikator Tingkat Inflasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti:

1. Faktor global: Dampak lanjutan pandemi COVID-19 dan ketegangan geopolitik (seperti perang Rusia-Ukraina) yang memengaruhi harga barang secara umum.



2. Kenaikan harga pangan: Kenaikan harga komoditas pokok di pasar yang memengaruhi daya beli masyarakat.
3. Gangguan Distribusi: Masalah pada rantai pasok lokal yang memicu ketidakstabilan harga
4. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan: Untuk mengatasi, Pemkab Mempawah mengintegrasikan strategi 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran, distribusi, dan Komunikasi efektif.

Dalam upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian indikator Tingkat Inflasi yaitu dengan memprioritaskan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif). Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan berupa fluktuasi harga kebutuhan pokok, dampak gelombang ekonomi nasional, serta risiko gangguan pasokan, terutama di akhir tahun 2025. Untuk memastikan harga terjangkau bagi masyarakat, Pemkab Mempawah melakukan langkah-langkah seperti Operasi pasar dan pasar murah, Bantuan sosial/Subsidi/ dan monitoring harga. Agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok., pemerintah daerah fokus pada Manajemen cadangan beras, Optimalisasi produksi pangan, dan High Level Meeting (HLM) TPID. Kemudian untuk kelancaran distribusi dilakukan sinergi antardaerah (KUPONWAH) dan melakukan pemantauan jalur distribusi komoditas dari daerah penghasil ke pasar untuk menghindari keterlambatan pasokan yang menyebabkan lonjakan harga. Yang terakhir meningkatkan koordinasi antara Pemkab Mempawah, TPID, Kepolisian/Polres (terkait keamanan distribusi), dan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas ekonomi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

Menurunnya Kemiskinan	Pemberdayaan Sosial	270.763.708	243.409.202	89,89	48,88	NA
	Rehabilitasi Sosial	748.640.008	645.117.633	86,17		
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	73.747.436	67.606.903	91,67		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.893.075.710	2.758.699.712	95,35		
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	106.476.000	106.471.200	99,99		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	119.532.500	115.996.708	97,04		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	412.136.620	407.337.176	98,83		
	Rata – Rata			94,14	48,88	NA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 94,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 48,88%, maka pada sasaran ini



tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerja sasaran tidak mencapai 100%.

Berdasarkan hasil perbandingan antara pagu anggaran pada tahapan APBD murni tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.122.213.776 dengan tahapan pergeseran APBD perubahan tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.624.371.982 terdapat beberapa program yang mengalami penurunan dan penambahan pagu dalam mendukung kinerja menurunnya kemiskinan pada indikator inflasi. Secara keseluruhan terdapat penurunan pada pagu program pendukung indikator inflasi sebesar 24,47 walaupun terdapat beberapa program yang mengalami kenaikan pagu.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sejumlah kebijakan penurunan angka kemiskinan melalui penurunan kemiskinan di setiap daerah dengan menerapkan berbagai kebijakan yaitu;

- (1) Konvergensi program, di mana kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan menerima manfaat bantuan dari seluruh program yang ada;
- (2) Kualitas implementasi program khususnya terkait pencairan anggaran yang tepat waktu untuk program kemiskinan;
- (3) Perbaikan pensasaran program, khususnya dengan terus menekan angka exclusion error kelompok miskin yang tidak menerima program;
- (4) Meningkatkan akses kelompok miskin pada layanan/infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Capaian Kinerja tersebut diperoleh berdasarkan pelaksanaan Program dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial sebagai Indikator Kinerja Utama Angka Kemiskinan (IKU) merupakan IKU yang diampu oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah selalu berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. yang salah satunya melalui program-program dan kegiatan yang ada pada bidang sosial pada tahun 2025.

Untuk indikator Tingkat Inflasi didukung dengan program :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial



3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Adapun strategi untuk meningkatkan capaian kinerja Inflasi adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Strategi 4K (Kestabilan harga dan Ketersediaan)
2. Kelancaran Distribusi dan Sinergi
3. Kebijakan berbasis data dan Inovasi

2.3.2.9. Sasaran 9 : ” Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat”

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing. Sasaran kinerja ini diukur dari capaian indikator kinerja indeks gini. Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Berikut capaian indikator kinerja tersebut.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Gini	Rasio	0,2746	0,257	106,41



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Capaian Kinerja Sasaran					106,41

Sumber : Bapperida Kab. Mempawah, 2026

Pada tahun 2025 target Indeks Gini yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 sebesar 0,2746 dengan realisasi indeks Gini Tahun 2025 sebesar 0,257. Sehingga pada tahun 2025, persentase capaian indeks sebesar 106,41 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,40 persen.

Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan standar rumus yang digunakan Badan Pusat Statistik. Data Indeks gini yang digunakan merupakan data yang berasal dari publikasi BPS Kabupaten Mempawah/BPS Kalimantan Barat baik yang dipublikasi secara online maupun diperoleh secara tertulis.

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks gini. Indeks gini atau rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau 1 orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Menurut Oshima nilai indeks gini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Indeks Gini < 0,35 : Tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah
2. $0,35 < \text{Indeks Gini} < 0,5$: Tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang
3. Indeks Gini > 0,5 : Tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi

a. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025

Indikator	Realisasi (%)	Capaian (%)
-----------	---------------	-------------



Kinerja	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Gini	0,291	0,254	0,257	88,08	98,40	106,41

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pada tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Mempawah sebesar 0,273 poin kemudian naik sebesar 0,302 pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 0,291. Selanjutnya pada tahun 2024 juga menurun secara signifikan sebesar 0,254 sementara pada tahun 2025 naik menjadi sebesar 0,257 atau terjadi kenaikan 0,003 poin. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan konsumsi 20 persen penduduk dengan pengeluaran teratas dan penurunan konsumsi 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah pada tahun 2024 sehingga gap antara 20 persen penduduk dengan pengeluaran teratas dengan 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah semakin sedikit meningkat. Berdasarkan kategorinya, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mempawah masih berada dalam kategori tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Tingkat indeks gini Kabupaten Mempawah relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan Barat. Pada tahun 2025 indeks gini Kalimantan Barat sebesar 0,316. Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Nilai rasio yang tinggi atau semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan di suatu wilayah timpang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	REALISASI 2025	Target Jangka Menengah
Indeks Gini	Nilai	0,257	0,2124

Data indeks Gini Tahun 2025 masih belum mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

IKU	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
-----	--------	----------------	-----------------



Indeks Gini	Nilai	0,257	0,379-0,382
-------------	-------	-------	-------------

Data indeks Gini Tahun 2025 Kabupaten Mempawah telah melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Capaian indeks gini Kabupaten Mempawah tahun 2025 menunjukkan kinerja yang lebih lambat dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Hal ini tercermin dari naiknya nilai indeks gini dari 0,254 pada tahun 2024 menjadi 0,257 pada tahun 2025 atau terjadi kenaikan sebesar 0,003 poin. Namun apabila realisasi dibandingkan dengan target di dalam RPD 2025-2026 menunjukkan capaian kinerja indeks gini meningkat dari 98,40 persen tahun 2024 menjadi 106,41 persen di tahun 2025. Melambatnya kinerja capaian indeks gini pada tahun 2025 disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja informal seperti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontraksi sebesar -4,05 persen, lapangan usaha Konstruksi berkontraksi -7,68 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh melambat dari 7,28 persen pada tahun 2024 menjadi 6,40 persen. Selain itu, dari sisi Pengeluaran juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada Konsumsi Rumah Tangga dari 5,49 persen menjadi 4,84 persen.

Strategi Pemecahan Masalah

Indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan antara 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah dan 20 persen penduduk dengan pengeluaran teratas. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran indeks gini tersebut adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok rentan atau berkaitan erat dengan kemiskinan. Dengan demikian untuk mengantisipasi hambatan dan kendala



dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan kolaborasi antar OPD teknis yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan penduduk rentan dan mengurangi beban pengeluaran.

a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.804.100	32.327.282	83,31	NA	NA
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	246.600.000	198.840.514	80,63		
	Pelayanan Penanaman Modal	30.242.400	29.637.564	98		
Rata – Rata				87,31	NA	NA

Realisasi indeks gini tidak dapat dibandingkan dengan anggaran karena realisasi kinerja belum rilis.

Berdasarkan hasil perbandingan antara pagu anggaran pada tahap APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 395.972.200 dengan tahap pergeseran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Rp. 309.646.500 diperoleh data bahwa terdapat penurunan/kenaikan pada program pendukung kinerja penurunan Indeks Gini. Secara keseluruhan terdapat penurunan pada pagu program pendukung peningkatan kinerja Indeks Gini sebesar 21,80 persen. Penurunan pada pagu program pendukung peningkatan kinerja Indeks Gini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian



Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Di dalam RPD 2025-2026 telah diidentifikasi Program-Program yang mendukung pencapaian kinerja indeks gini namun dalam proses penganggaran masih terdapat beberapa program yang belum dapat diakomodir dalam APBD seperti Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengembangan UMKM yang menunjukkan bahwa pada tahap APBD Induk 2025 sudah tidak terdapat alokasi anggaran. Melalui penganggaran Program Promosi Penanaman Modal diharapkan akan mendorong investasi di Kabupaten Mempawah yang selanjutnya akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap Tingkat pendapatan Masyarakat. Terutama investasi pada sektor-sektor padat karya. Sementara itu, Program Pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan nilai tambah dan kapasitas produksi UMKM dan Kapasitas SDM UMKM.

h. Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya

Adapun strategi untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Gini tahun 2025 masih dapat difokuskan pada Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan lapangan usaha melalui peningkatan investasi, peningkatan skala usaha petani dan nelayan, serta pemerataan akses dan kesempatan kerja dan pemberian bantuan sosial serta memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

2.3.2.10. Sasaran 10 : " *Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat* "

Sasaran ini bertujuan untuk Meningkatkan Kemandirian Daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing. Tingkat kemandirian desa diukur dengan



menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks desa membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks desa membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks antara lain indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa.

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemandirian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintahan. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Secara rinci capaian kinerja sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
-------------------	--------	--------	-----------	-------------



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Desa Membangun	indeks	0,9222	0,88	95,42
Capaian Kinerja Sasaran				

Sumber : DinasSosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi tahun 2025 indikator indeks desa membangun belum mencapai target sebesar 0,88, dengan capaian kinerja sebesar 95,42%. Realisasi kinerja diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah desa mandiri dengan jumlah seluruh desa. Pada tahun 2025 sasaran/ target dari IDM adalah pada Desa yang berstatus Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang berjumlah 2 Desa. Dan untuk Desa yang berstatus Maju berjumlah 5 Desa. Sedangkan Desa Mandiri berjumlah 53 Desa, yang realisasinya di tahun 2025 ada 53 Desa yang telah berstatus Desa Mandiri.

Berikut ambang batas Klasifikasi Status Desa:

No	Status Desa	Ambang Batas
1	Desa Mandiri	IDM > 0,8155
2	Desa Maju	$0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$
3	Desa Berkembang	$0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$
4	Desa Tertinggal	$0,4907 < \text{IDM} \leq 0,5989$
5	Desa Sangat Tertinggal	$\text{IDM} \leq 0,4907$

Secara rinci realisasi desa yang dikategorikan sebagai desa mandiri adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Status Desa di Kabupaten Mempawah Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Status Desa
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	Mandiri
2	Mempawah Hilir	Penibung	Mandiri
3	Mempawah Hilir	Pasir	Mandiri
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	Mandiri
5	Mempawah Hilir	Malikian	Mandiri
6	Toho	Toho ilir	Mandiri
7	Toho	Pak Laheng	Mandiri



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

8	Toho	Kecurit	Mandiri
9	Toho	Terap	Mandiri
10	Toho	Sepang	Mandiri
11	Toho	Pak Utan	Maju
12	Toho	Benuang	Mandiri
13	Toho	Sambora	Mandiri
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	Mandiri
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Darat	Mandiri
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	Mandiri
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	Mandiri
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	Mandiri
19	Sungai Pinyuh	Peniraman	Mandiri
20	Sungai Pinyuh	Nusapati	Mandiri
21	Sungai Pinyuh	Galang	Mandiri
22	Jongkat	Wajok Hilir	Mandiri
23	Jongkat	Sungai Nipah	Mandiri
24	Jongkat	Peniti Luar	Mandiri
25	Jongkat	Wajok Hulu	Mandiri
26	Jongkat	Jungkat	Mandiri
27	Sungai Kunyit	Sungai Duri I	Mandiri
28	Sungai Kunyit	Sungai Duri II	Mandiri
29	Sungai Kunyit	Bukit Batu	Mandiri
30	Sungai Kunyit	Sungai Bundung Laut	Mandiri
31	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	Mandiri
32	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Dalam	Mandiri
33	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Hulu	Mandiri
34	Sungai Kunyit	Sungai Limau	Mandiri
35	Sungai Kunyit	Sungai Dungun	Mandiri
36	Sungai Kunyit	Mendalok	Mandiri
37	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden	Maju
38	Sungai Kunyit	Semudun	Mandiri
39	Segedong	Peniti Besar	Mandiri
40	Segedong	Sungai Purun Besar	Mandiri
41	Segedong	Parit Bugis	Mandiri
42	Segedong	Peniti Dalam I	Mandiri
43	Segedong	Peniti Dalam II	Mandiri



44	Segedong	Sungai Burung	Mandiri
45	Anjongan	Anjungan Dalam	Mandiri
46	Anjongan	Kepayang	Mandiri
47	Anjongan	Pak Bulu	Mandiri
48	Anjongan	Dema	Mandiri
49	Sadaniang	Sekabuk	Mandiri
50	Sadaniang	Pentek	Maju
51	Sadaniang	Bum-Bun	Maju
52	Sadaniang	Amawang	Maju
53	Sadaniang	Ansiap	Berkembang
54	Sadaniang	Suak Berangan	Berkembang
55	Mempawah Timur	Antibar	Mandiri
56	Mempawah Timur	Sejegi	Mandiri
57	Mempawah Timur	Pasir Palembang	Mandiri
58	Mempawah Timur	Pasir Panjang	Mandiri
59	Mempawah Timur	Sungai Bakau Kecil	Mandiri
60	Mempawah Timur	Parit Banjar	Mandiri

Sumber : DinasSosial PPPAPMPD Kab. Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mempawah mempunyai desa dengan predikat “Desa Mandiri”. Untuk kecamatan dengan jumlah desa mandiri terbanyak terdapat pada Kecamatan Sungai Kunyit yang berjumlah 11 desa, sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah desa mandiri paling sedikit berada pada Kecamatan Sadaniang berjumlah 1 desa.

Komponen penilaian dalam Indeks Desa Membangun antara lain :

1. **Aksesibilitas**: yaitu menilai sejauh mana aksesibilitas infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih dan telekomunikasi di desa.
2. **Kesehatan** : melihat kualitas layanan kesehatan yang tersedia, seperti jumlah tenaga medis, fasilitas kesehatan, dan status kesehatan masyarakat desa.
3. **Pendidikan** : menilai ketersediaan dan kualitas layanan pendidikan di desa, termasuk jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, serta tingkat partisipasi anak-anak sekolah.
4. **Ekonomi** : mengukur tingkat kemakmuran ekonomi desa, seperti pendapatan rata-rata penduduk desa, tingkat kemiskinan, dan kesempatan kerja yang ada.
5. **Lingkungan** Melihat pengelolaan dan kualitas lingkungan hidup desa, termasuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.
6. **Kehidupan Sosial dan Budaya** : menilai dinamika sosial dan budaya masyarakat desa, seperti partisipasi dalam kegiatan sosial, budaya dan tingkat kesadaran sosial masyarakat.



7. **Pemerintahan dan Kelembagaan** : Mencakup penilaian terhadap tata kelola pemerintahan desa, kepemimpinan, serta kualitas dan transparansi pengelolaan anggaran desa

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Desa Membangun	0,85	0,88	0,88	-	-	95,42

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi dan capaian kinerja indikator indeks desa membangun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dilihat berdasarkan capaian tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Indeks Desa Membangun	indeks	0,88	-

Indikator indeks desa membangun tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena indikator ini tidak dijadikan IKU untuk tahun berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target nasional



SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,88	-

Berdasarkan kebijakan terbaru Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) serta arah RPJMN 2025-2029, target nasional Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025 difokuskan pada peningkatan signifikan jumlah Desa Mandiri dan penghapusan status desa tertinggal. Dan untuk Kabupaten mempawah sudah tidak ada desa yang berstatus desa tertinggal, dalam hal ini Kabupaten Mempawah sudah mencapai target yang diharapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

1. Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja IDM dapat di pengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pembangunan (RPJMDes) yang tepat sasaran (program desa disusun berdasarkan kebutuhasn riil masyarakat, Sinkronisasi RPJMDes, RKPDes, dan Dana Desa dengan Indikator IDM. Yang berdampak terjadinya peningkatan pada dimensi Sosial, ekonomi dan Lingkungan desa.
- b. Optimalisasi Dana Desa dan Sumber Pendanaan Lain (dana desa di fokuskan pada pembanguinan infrasturktur dasar, kesaehatan, pendidikan dan ekonomi produktif, pemanfaatan bantuan pemerintah daerah dan pusat secara efektif) Yang berdampak terhadap akses masyarakat terhadap layanan dasar meningkat sehingga sekor IDM naik.
- c. Penguatan Kelembagaan Desa (Bumdes aktif dan berkembang, LKD berjalan efektif). Hal tersebut berdampak pada peningkatan ketahanan ekonomi dan Sosial desa.
- d. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi (Masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan) Berdampak pada program desa lebih berkelanjutan dan tepat guna.

2. Penyebab Kegagalkan Pencapaian / Penurunan Kinerja IDM

- a. Keterbatasan Anggaran dan proritas Pembangunan (Dana Desa lebih Banyak terserap untuk kebutuhan mendesak (misalnya bantuan sosial dtau bencana, kurangnya anggaran untuk pengembangan ekonomi dan lingkungan).
- b. Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Belum memadai (Jalan, sanitasi, air bersih atau jaringan komunikasi belum merata, Fasilitas pendidikan dan kesehatan terbatas)



- c. Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Desa (Kurangnya pemahaman terhadap indikator IDM, perencanaan dan pelaporan belum optimal).
- d. Faktor Eksternal (Bencana alam, pandemi atau kondisi ekonomi nasional, Migrasi penduduk produktif ke Kota. Hal ini bisa berdampak pada dimensi Sosial dan ekonomi mengalami penurunan atau tidak meningkat signifikan.

3. Alternatif Solusi yang telah / dapat dilakukan dalam pencapaian IDM

- a. Perbaikan Perencanaan berbasis Data IDM
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelembagaan Desa
- c. Peningkatan Layanan Dasar
- d. Pengembangan Ekonomi Lokal
- e. Peningkatan Partisipasi dan Kolaborasi

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.893.075.701	2.758.699.712	95,35	95,42	NA
	Rata – Rata			95,35	95,42	NA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,35% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 95,42%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat dihitung karena capaian sasaran ini belum mencapai 100%.

Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa refocusing anggaran yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari perhitungan kinerja secara berkala telah meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memperkuat pencapaian kinerja. Melalui kebijakan ini, anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan



peningkatan indeks desa membangun walaupun terdapat target kegiatan yang tidak tercapai.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program /kegiatan/Sub.Kegiatan yang tidak efektif umumnya disebabkan oleh perencanaan yang kurang berbasis data, ketidaktepatan sasaran, keterbatasan kapasitas pelaksana, serta minimnya partisipasi masyarakat, Oleh karena itu kedepan diperlukan perbaikan perencanaan, penajaman sasaran kegiatan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian kinerja, dengan adanya program dan kegiatan yang berkaitan dengan IDM lebih khususnya.

Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya :

Difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis data, optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaan program prioritas, serta penguatan monitoring dan inovasi. Dengan penerapan strategi tersebut, diharapkan capaian kinerja dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

2.3.2.11. Sasaran 11 : ” Meningkatkan Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Kerja”

Sasaran ini bertujuan untuk “Meningkatkan kemandirian daerah melalui sektor unggulan yang memiliki daya saing. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Capaian Kinerja sasaran ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :



a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,85	4,74	130,80
Capaian Kinerja Sasaran				130,80

Sumber: Disperindagnaker Kab. Mempawah, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 sebesar 4,74% dengan capaian kinerja sebesar 130,80%. Tingginya capaian kinerja dikarenakan realisasi yang didapat jauh melebihi dari target yang ditetapkan.

Jumlah Angkatan kerja ini merupakan angka pengangguran di Kabupaten Mempawah di dapat dari jumlah Pencari Kerja yang terdaftar dikurang Pencari Kerja yang ditempatkan sedangkan Jumlah Angkatan kerja tersebut di atas merupakan jumlah kelompok Umur Usia Produktif dengan rentang Usia 15 Tahun s.d Usia 44 Tahun yang rata-rata Mencari Pekerjaan di Kabupaten Mempawah. Dalam rentang usia ini dimana mereka di anggap mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Data ini diperoleh Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat yang terakhir diperbaharui tanggal 21 Januari 2026.

Berikut data pencari kerja perkecamatan di Kabupaten Mempawah :

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Anjongan	12	20	32
2	Jongkat	22	19	41
3	Mempawah Hilir	117	92	209
4	Mempawah Timur	67	59	126
5	Sadaniang	4	1	5
6	Segedong	15	17	32
7	Sungai Kunyit	201	131	332



8	Sungai Pinyuh	145	180	325
9	Toho	10	13	23
Jumlah		593	532	1125

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah pencari kerja tertinggi yaitu berada di Kecamatan Sungai Kunyit dan kecamatan dengan pencari kerja terendah yaitu berada di Kecamatan Sadaniang.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 11.2

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,33	6,78	4,74	-	-	130,80

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan disetiap tahunnya.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah
Tabel 11.3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,74	6,16

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025 sebesar 4,74% dengan target jangka menengah sebesar 6,16%, maka realisasi indikator tersebut di atas sudah melampaui target jangka menengah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional
Tabel 11.4

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISA	TARGET
-------------------	-----	---------	--------



		SI 2025	NASIONAL
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,74	4,1

Sumber : Disperindagnaker Kab. Mempawah, 2026

Apabila dibandingkan dengan target nasional Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kabupaten Mempawah telah belum mencapai target nasional. Namun sudah mendekati target nasional dengan selisih 0,64%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor Keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada sasaran ini antara lain:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 49 tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan Perusahaan
2. Tetap Melakukan Sosialisasi kepada Perusahaan-perusahaan untuk memperdayakan atau mempekerjakan Pekerja Lokal atau Warga Tempatan di Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mempawah sesuai dengan amanat Bupati Mempawah melalui Surat Edaran Bupati Mempawah Nomor: 500.15.12/0211/DISPERINDAGNAKER-C Tentang Pendayagunaan Tenaga Kerja Lokal di Kabupaten Mempawah.
3. Selalu Memberikan Pelayanan Bimbingan Jabatan Kepada Pencari Kerja untuk mendaftarkan diri mereka kedalam Aplikasi Siap Kerja Kemenaker.
4. Memberikan Informasi Loker (lowongan pekerjaan) Melalui media-media sosial resmi Dinas agar mudah di akses para pencari kerja di Kabupaten Mempawah.
5. menambah Anggaran di setiap Sub Kegiatan

Strategi Pemecahan Permasalahan



1. Pengembangan UMKM dan Wirausaha: Program yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan mampu menyerap tenaga kerja secara informal maupun formal.
2. Revitalisasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi: Link and match antara kurikulum pendidikan (SMK/Universitas) dengan kebutuhan industri terbukti efektif mengurangi pengangguran struktural. Semakin kita mengetahui Keahlian dan Tingkat Pendidikan serta Jurusan Pendidikan kebutuhan Tenaga Kerja yang dibutuhkan Perusahaan-perusahaan maka semakin banyak tenaga kerja kita yang bisa terserap.
3. menambah Anggaran di setiap Sub Kegiatan

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Kerja	Penempatan Tenaga Kerja	40.315.860	40.315.860	100	130,80	30,8
Rata – Rata				100	130,80	30,8

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 100% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 130,80%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 30,8.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Untuk melaksanakan Capaian Kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka terdapat dua sub kegiatan pada Bidang Tenaga Kerja di Seksi Penempatan Pelatihan dan Produktifitas yang dinilai masih kurang berkontribusi di dalam mengatasi tingkat pengangguran terbuka apalagi jumlah dana dari kedua sub kegiatan dimaksud sangat minim.

Di tahun 2026 ini Sub. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di hapuskan atau di refocusing dan diganti dengan Perlindungan PMI (Pra dan Purna) di daerah Kabupaten Mempawah, dan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar kerja online masih tetap, diharapkan semua Sub. Kegiatan ini dapat di akomodir karna data-data yang dikumpulkan atau hasil yang diperoleh dari ke tiga sub kegiatan ini merupakan titik tolak ukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam mengatasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mempawah.

2.3.2.12. Sasaran 12 : " *Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan* "

Pelaksanaan sasaran ini mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, berkelanjutan, aman dan tertib. Sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta mengintegrasikan antar moda untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa guna mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni dan Persentase Jalan Mantap. Persentase Rumah layak huni merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni terhadap jumlah penduduk. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Sedangkan Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang di katakan tidak mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun capaian kinerja sasaran ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



a. **Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	91	91,42	100,46
Persentase Jalan Mantap	%	61,75	42,94	69,54
Capaian Kinerja Sasaran				85

Sumber : Dinas Perkimtan dan Dinas PUPR, 2026

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mempawah selama tahun 2025 dalam mencapai sasaran tersebut dengan capaian kinerja sebesar 85%, sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran diatas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1) Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni

Capaian Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni Kabupaten Mempawah sebesar 91,42% yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara jumlah rumah yang layak huni dengan total seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten.

Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni adalah indikator kinerja utama yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memfasilitasi ketersediaan hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, serta kesehatan penghuninya. Indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar, sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011, sebuah hunian dikategorikan layak apabila memenuhi tiga pilar standar utama, yaitu :

1. Keselamatan Bangunan, Kekuatan struktur bangunan yang memadai
2. Kesehatan, Tersedianya sanitasi, akses air minum bersih, serta pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
3. Kecukupan Luas, Memenuhi standar luas minimum per kapita (rata-rata 9 m² per orang).

Berikut disajikan kondisi rumah Kabupaten Mempawah Tahun 2026 :



Jumlah Kondisi Rumah Kabupaten Mempawah Tahun 2026

No	Kecamatan	RTLH 2025	Penanganan RTLH Tahun 2025	Persentase Rumah Tangga Layak Huni Tahun 2025	Jumlah Unit Rumah Terfasilitasi Jalan Lingkungan
1	Sungai Kunyit	166	21	97,707	6.199
2	Mempawah Hilir	1.020	66	90,723	9.297
3	Mempawah Timur	464	-	93,788	7.016
4	Sungai Pinyuh	782	15	94,160	12.202
5	Segedong	435	65	92,976	4.861
6	Jongkat	1.180	27	88,492	8.906
7	Anjongan	264	2	93,955	4.055
8	Toho	917	10	81,460	3.958
9	Sadaniang	471	10	78,902	1.714
Jumlah		5.699	216	91,420	58.208

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah dengan persentase rumah layak huni tertinggi di Kabupaten Mempawah berada di Kecamatan Sungai Kunyit, sedangkan kecamatan dengan persentase rumah layak huni terkecil berada di Kecamatan Sadaniang.

2) Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil penilaian kinerja pada tahun 2025, indikator Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap menunjukkan realisasi kinerja sebesar **42,94%**. Dengan target yang telah ditetapkan sebesar **61,75%**, capaian kinerja tersebut mencapai **69,54%**. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.

Kondisi di lapangan pada Jalan Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa sebagian ruas jalan telah berada dalam kondisi mantap melalui kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan. Penanganan difokuskan pada ruas-ruas strategis yang memiliki tingkat mobilitas tinggi serta berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan konektivitas antarwilayah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa ruas jalan yang



memerlukan penanganan lanjutan sehingga capaian kondisi jalan mantap belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.

Belum optimalnya pencapaian target tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan efisiensi anggaran, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengendalian dan efisiensi belanja pemerintah. Kebijakan ini berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran infrastruktur jalan, sehingga tidak seluruh rencana penanganan dapat dilaksanakan secara optimal dalam satu tahun anggaran. Menyikapi kondisi tersebut, perangkat daerah melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan, antara lain dengan memprioritaskan penanganan ruas jalan yang paling mendesak, mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah mantap, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia. Penyesuaian target dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, kemampuan fiskal daerah, serta kebijakan nasional yang berlaku.

Dengan capaian kinerja sebesar 69,54%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten Mempawah pada tahun 2025 telah berjalan cukup baik di tengah keterbatasan anggaran, namun masih memerlukan upaya lanjutan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kedepan, diperlukan komitmen berkelanjutan melalui perencanaan yang lebih adaptif, penganggaran yang efisien, serta sinergi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi guna meningkatkan persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap secara bertahap.

Rekapitulasi Kondisi jalan Kabupaten Mempawah Tahun 2025

No	Kecamatan	Kondisi Ruas Jalan (Km)				Kondisi Ruas Jalan (%)				Total Panjang Ruas (Km)
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kec. Mempawah Hilir	4,41	9,28	19,30	15,21	1,77	3,40	6,01	4,82	48,20
2	Kec. Mempawah Timur	15,60	28,98	16,43	18,97	3,60	8,42	4,36	5,62	79,98
3	Kec. Sungai Kunyit	6,36	13,61	10,06	19,69	1,79	3,40	2,84	5,98	49,72
4	Kec. Sungai Pinyuh	12,58	13,60	16,59	21,58	4,02	3,60	5,07	8,32	64,35
5	Kec. Anjungan	1,30	12,63	8,46	7,15	0,24	2,36	1,78	1,62	29,54
6	Kec. Toho	16,36	24,37	13,37	23,49	3,54	5,33	3,02	6,11	77,59
7	Kec. Sadaniang	6,99	18,24	15,60	83,57	0,95	3,17	2,87	15,02	124,40
8	Kec. Segedong	26,62	13,30	16,39	14,73	5,81	3,32	3,63	4,24	71,04



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025**

9	Kec. Jongkat	8,42	31,59	16,95	37,39	2,18	7,52	4,31	9,99	94,35
10	IKK Mempawah	12,85	15,23	10,81	3,34	10,53	22,41	8,16	1,90	42,24
JUMLAH TOTAL		111,49	180,82	143,96	245,13	16,40	26,54	21,13	35,97	681,40
Total Panjang Ruas Jalan Mantap (Baik dan Sedang)						292,60 Km				
Total Panjang Ruas Jalan Mantap (Baik dan Sedang)						42,94 %				

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mempawah, 2026

Berdasarkan rekapitulasi tersebut, total panjang jalan kabupaten mencapai 681,40 Km, dengan panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) sebesar 292,60 Km atau 42,94% dari total panjang jalan. Data ini menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja Persentase Jalan Mantap, serta digunakan sebagai acuan perencanaan, penentuan prioritas penanganan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mempawah.

Tabel ini menyajikan kondisi jaringan jalan kabupaten di 9 kecamatan di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2025, dengan pengelompokan kondisi jalan sebagai berikut:

- a. Panjang jalan dengan kondisi Baik 111,49 Km;
- b. Panjang jalan dengan kondisi sedang 180,82 km;
- c. Panjang jalan dengan kondisi Rusak Ringan 143,96 km;
- d. Panjang jalan dengan kondisi Rusak Berat 254,13 km.

Jika dilihat berdasarkan persentase kondisi jalan, kondisi rusak berat merupakan porsi terbesar yaitu 35,97 %. Ini menunjukkan masih perlunya penanganan signifikan pada jaringan jalan kabupaten. Lebih dari 57% jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, yang menjadi tantangan utama penyelenggaraan infrastruktur jalan.

Beberapa kecamatan dengan jalan terpanjang antara lain Kecamatan Sadaniang 124,40 km, Kecamatan Jongkat 94,35 km, Kecamatan Mempawah Timur 79,98 km, Kecamatan Toho 77,59. Wilayah ini membutuhkan perhatian khusus karena cakupan jaringan jalan yang luas. Sedangkan kecamatan dengan kondisi jalan rusak berat tinggi antara lain Kecamatan Sadaniang 83,57 km, Kecamatan Jongkat 37,39 km, Kecamatan Sungai Pinyuh 21,58 km dan Kecamatan Toho 23,49. Beberapa wilayah ini menjadi prioritas utama penanganan



karena kondisi jalan rusak berat berdampak langsung pada aksesibilitas dan pelayanan publik.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	90,77	91,16	91,42	-	-	100,46
Persentase Jalan Mantap	60,95	41,40	42,94	93,94	61,79	69,54

Berdasarkan tabel tersebut diatas realisasi Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni mengalami peningkatan pada setiap tahun nya.

Sedangkan untuk indikator Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2025. Rata-rata Realisasi Kinerjanya mencapai 42,94% atau naik sekitar 1,54% jika dibandingkan dengan Rata-rata realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 41,40%. Meningkatnya realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 disebabkan adanya pemutahiran data Jalan Kabupaten sebelumnya yaitu Keputusan Bupati Mempawah Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dengan total Panjang 632,073 Km menjadi 681,400 Km.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	%	91,42	92
Persentase Jalan Mantap	%	42,94	48,32



Realisasi Persentase Pemenuhan Rumah Layak huni Tahun 2025 sebesar 91,42, ini menunjukkan bahwa realisasi pada Tahun 2025 hampir mencapai target Jangka Menengah dengan selisih 0,58% saja.

Sedangkan Persentase Jalan Mantap tahun 2025 sebesar 42,94% dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 48,32%, masih belum mencapai target akhir.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni	91,42	65,25%
	Persentase Jalan Mantap	42,94%	90%

Untuk Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni tahun 2025 jika dibandingkan dengan target nasional telah melebihi target nasional.

Sedangkan Persentase Jalan Mantap Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, realisasi Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap tercatat sebesar 42,94%. Apabila dibandingkan dengan Target Nasional kondisi jalan mantap sebesar 90,00%, capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemantapan jalan kabupaten masih berada di bawah standar nasional yang diharapkan.

Realisasi kinerja Tahun 2025 tersebut masih berada di bawah kebutuhan capaian tahunan sebesar 47,06%, yang diperlukan sebagai rata-rata realisasi agar target Jalan Mantap Nasional dapat tercapai pada Tahun 2026. Dengan kondisi tersebut, diperlukan peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan guna mengejar ketertinggalan terhadap target nasional.

Dalam rangka mencapai Target Nasional Jalan Mantap, dibutuhkan dukungan pendanaan yang optimal dan berkelanjutan, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja swakelola, maupun belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, serta



pemeliharaan jalan kabupaten sehingga target nasional dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

1. Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni

Analisis Hambatan:

Meskipun program telah direncanakan secara sistematis, tantangan muncul akibat keterbatasan ruang fiskal atau pemangkasan anggaran daerah. Kurangnya anggaran berdampak langsung pada: Penurunan Volume Output yaitu berkurangnya jumlah unit rumah yang dapat direhabilitasi dalam satu tahun anggaran.

Solusi Strategis dan Antisipasi Kendala

Untuk mengatasi kendala anggaran dan memastikan target kinerja tetap tercapai, pemerintah daerah menerapkan dua langkah strategis:

- A. Percepatan Pelaksanaan (Front-Loading) Salah satu solusi utama adalah melaksanakan kegiatan seawal mungkin pada Triwulan I atau II. Strategi ini bertujuan untuk: Menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun.
- B. Memastikan penyerapan anggaran lebih efektif sebelum terjadinya potensi realokasi atau pemangkasan di tengah tahun (refocusing). Mempercepat masyarakat dalam merasakan manfaat hunian yang layak.
- C. Optimalisasi Sumber Daya
Meningat keterbatasan dana daerah, diperlukan alternatif solusi seperti: Kolaborasi Lintas Sektor, Mengintegrasikan bantuan dari Dana Desa atau dana stimulan lainnya, melaksanakan sinergi dengan mendorong partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu pembiayaan perbaikan rumah bagi warga kurang mampu.

2. Capaian Kinerja Persentase Jalan Mantap

Pada Tahun 2025, capaian kinerja jalan mencapai 69,54%, yang menunjukkan bahwa indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,50% dibandingkan capaian kinerja jalan mantap pada Tahun 2024 yang tercatat sebesar 67,04%,



serta mengalami penurunan signifikan sebesar 30,46% dibandingkan capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 100,00%. Realisasi capaian kinerja pada Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh adanya pemutakhiran data Jalan Kabupaten, dari sebelumnya mengacu pada Keputusan Bupati Mempawah Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten dengan total panjang 632,073 km, menjadi 681,400 km. Pemutakhiran data tersebut berdampak signifikan terhadap capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024.

a. Perkembangan Kondisi Jalan Mantap

Berdasarkan komposisi kondisi jalan mantap, terjadi perubahan pada persentase Panjang ruas jalan berdasarkan kondisi. Persentase panjang ruas jalan dalam kondisi sedang mengalami perubahan dari 26,47% pada Tahun 2024 menjadi 26,54% pada Tahun Anggaran 2025, atau meningkat sebesar 0,07%. Sementara itu, persentase panjang ruas jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2025 tercatat sebesar 16,40%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika kualitas jalan yang perlu terus dimonitor untuk menjaga tingkat kemantapan jalan kabupaten.

b. Pengendalian Penurunan Kondisi Jalan

Dalam rangka mengurangi laju penurunan kondisi jalan, khususnya pada ruas-ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang, Pemerintah Kabupaten Mempawah melaksanakan upaya penanganan melalui subkegiatan rekonstruksi jalan serta subkegiatan pemeliharaan rutin jalan secara swakelola. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan agar tidak mengalami penurunan serta untuk menjaga keberlanjutan fungsi jaringan jalan kabupaten.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan	Kawasan Permukiman	400.777.600	377.271.930	94,13	85	NA
	Penyelenggaraan jalan	41.733.357.110	33.892.383.403	81,21		
Rata – Rata				87,67	85	NA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 87,67% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 85%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya tidak mencapai 100%.

Analisis efisiensi dilakukan berdasarkan penghitungan kinerja secara berkala terhadap capaian indikator Persentase Jalan Mantap, dengan membandingkan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun Anggaran 2025. Hasil penghitungan kinerja tersebut menjadi dasar dalam identifikasi dan refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kinerja utama.

Identifikasi Anggaran yang Direfocusing

Berdasarkan evaluasi kinerja dan realisasi anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang diidentifikasi kurang memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Persentase Jalan Mantap, sehingga dilakukan penyesuaian dan pengendalian pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Penggantian Jembatan

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran yang besar, namun realisasi anggarannya sangat rendah. Selain itu, penggantian jembatan tidak secara langsung memengaruhi indikator Persentase Jalan Mantap. Oleh karena itu, sebagian anggaran kegiatan ini direfocusing untuk mendukung kegiatan penanganan



jalan yang berdampak langsung pada peningkatan kondisi jalan mantap.

2. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan

Meskipun penting dalam mendukung konektivitas wilayah, kegiatan jembatan tidak termasuk dalam komponen perhitungan kondisi jalan mantap. Dengan mempertimbangkan keterbatasan fiskal daerah, pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dan sebagian alokasi anggarannya dialihkan untuk kegiatan yang lebih berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama.

3. Kegiatan Perencanaan Teknis dan Penyusunan Dokumen

Kegiatan perencanaan bersifat administratif dan berdampak jangka menengah, sehingga pada tahun berjalan dilakukan pengendalian realisasi anggaran. Efisiensi dari kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan fisik jalan.

Pemanfaatan Hasil Refocusing Anggaran

Anggaran hasil refocusing selanjutnya diarahkan untuk:

1. rekonstruksi jalan,
2. rehabilitasi jalan, dan
3. pemeliharaan rutin jalan

secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang, sehingga mendorong tercapainya kinerja Persentase Jalan Mantap sesuai target yang ditetapkan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa refocusing anggaran telah dilakukan secara selektif dan berbasis kinerja, dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap indikator kinerja utama. Langkah ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengurangi kualitas layanan infrastruktur jalan kepada masyarakat.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Untuk Indikator Persentase Pemenuhan Rumah Layak huni didukung Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan



Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang bertujuan untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak.

Sedangkan Indikator Persentase Jalan Mantap Berdasarkan perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 pada Program Penyelenggaraan Jalan, terdapat beberapa kegiatan yang belum efektif secara langsung dalam meningkatkan capaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggantian Jembatan

Meskipun memiliki pagu anggaran yang relatif besar, realisasi anggarannya sangat rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Selain itu, kegiatan penggantian jembatan tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kondisi jalan mantap, karena indikator Persentase Jalan Mantap lebih berfokus pada kondisi perkerasan jalan, bukan struktur jembatan.

2. Pembangunan Jembatan

Kegiatan ini lebih bersifat peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, namun tidak berpengaruh langsung terhadap perubahan kondisi jalan eksisting. Dengan demikian, kontribusinya terhadap peningkatan persentase jalan mantap relatif terbatas.

3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jembatan

Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan bertujuan menjaga fungsi dan keselamatan struktur jembatan, namun tidak masuk dalam komponen penilaian kondisi jalan mantap, sehingga dampaknya terhadap indikator kinerja Persentase Jalan Mantap tidak signifikan.

4. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis

Kegiatan ini bersifat perencanaan dan administratif, sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kondisi fisik jalan pada tahun berjalan. Dampaknya lebih bersifat jangka menengah dan jangka Panjang.



h. Penjelasan Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Jalan Mantap, masih terdapat beberapa program dan kegiatan strategis yang diperlukan namun belum sepenuhnya terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Penanganan Jalan Rusak Berat secara Menyeluruh

Masih terdapat ruas jalan kabupaten dengan kondisi rusak berat yang memerlukan peningkatan struktur dan rekonstruksi menyeluruh. Keterbatasan alokasi anggaran menyebabkan penanganan dilakukan secara bertahap, sehingga diperlukan tambahan program rekonstruksi jalan untuk meningkatkan panjang jalan mantap secara signifikan.

2. Pemeliharaan Berkala Jalan yang Berbasis Preventif

Pemeliharaan berkala secara preventif pada seluruh jaringan jalan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan ini penting untuk mencegah penurunan kondisi jalan baik dan sedang, sehingga perlu dukungan program pemeliharaan berkala yang berkelanjutan dan terencana.

Program dan kegiatan tersebut sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan capaian kinerja Persentase Jalan Mantap, namun belum sepenuhnya dapat diakomodir dalam APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pendanaan alternatif, sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta penajaman prioritas pembangunan infrastruktur jalan.

i. Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya

Persentase Pemenuhan Rumah Layak Huni

Strategi Percepatan Pengentasan RTLH

Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan persentase Rumah Layak Huni, Pemerintah Kabupaten mengandalkan Program Kawasan Permukiman, khususnya pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (untuk luasan di



bawah 10 Ha, dimana faktor pendukung utama dalam mempercepat pengentasan ini adalah melalui Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Fokus kegiatan ini tidak hanya pada perbaikan fisik, tetapi juga bertujuan untuk: memberikan stimulus bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mandiri memperbaiki huniannya, menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan tertata secara terintegrasi.

Disamping itu dalam mencapai sasaran pengentasan, kolaborasi kegiatan serupa dari APBD Provinsi, APBN dan pihak lain juga turut mendorong percepatan pengentasan Rumah Tidak Layak Huni. Untuk porsi APBN, Program Pengentasan RTLH dilaksanakan oleh Balai Penyedia Perumahan Kalimantan I melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sedangkan melalui APBD Provinsi melalui Program Bedah Rumah yang diinisiasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar yang berkolaborasi dengan TP PKK Provinsi Kalbar. Kegiatan lain yang serupa juga berasal dari kegiatan internal institusi POLRI (Polres Mempawah), TNI, BAZNAS dan CSR Perusahaan

Persentase Jalan Mantap

1. Penajaman Prioritas Penanganan Jalan

Menetapkan prioritas penanganan pada ruas jalan dengan tingkat kerusakan sedang dan rusak ringan yang memiliki potensi tinggi untuk segera ditingkatkan menjadi kondisi mantap, sehingga peningkatan capaian kinerja dapat dicapai secara lebih cepat dan efisien

2. Optimalisasi Pemeliharaan Preventif

Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala secara preventif untuk mencegah penurunan kondisi jalan yang telah mantap. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta mengurangi kebutuhan biaya rekonstruksi yang lebih besar di masa mendatang.

3. Penguatan Perencanaan Berbasis Data

Meningkatkan kualitas survei kondisi jalan secara berkala dan terstandar, serta memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penentuan program dan kegiatan penanganan jalan. Perencanaan berbasis data yang akurat akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

4. Refocusing dan Efisiensi Anggaran



Melanjutkan kebijakan refocusing anggaran dengan mengarahkan alokasi belanja pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan Persentase Jalan Mantap, seperti rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemeliharaan jalan, serta mengurangi kegiatan yang tidak berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama.

5. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Pendanaan

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (OAK), bantuan keuangan, maupun skema pendanaan lainnya guna menutup keterbatasan fiskal daerah.

6. Peningkatan Pengendalian dan evaluasi Kinerja

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan jalan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan program pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

7. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan manajemen teknis di bidang jalan melalui pelatihan dan pendampingan teknis, guna memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutan kondisi jalan mantap.

2.3.2.13. Sasaran 13 : "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Sasaran ini mempunyai bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, berkelanjutan, aman dan tertib. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui capaian indikator kinerja "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut. Secara rinci capaian kinerja indikator tersebut sebagai berikut:



a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68	67,30	98,97
Capaian Kinerja Sasaran				98,97

Sumber : DishubLH Kabupaten Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Indeks kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,30 dengan capaian kinerja sebesar 98,97%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 68 maka realisasi kinerja Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan hasil penjumlahan dari beberapa indikator lingkungan yang masing-masing indikator telah ditentukan persentase kontribusi pengaruh terhadap lingkungan.

Penghitungan indeks kualitas lingkungan hidup merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan. Komponen indeks yang harus dihirung dan diketahui nilainya untuk perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup berdasarkan level wilayah yaitu :

- Indeks kualitas lingkungan hidup nasional meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut.
- Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut.
- Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan.

Data pemantauan kualitas lingkungan seperti hasil uji sampling air sungai untuk nilai indeks kualitas air, hasil deliniasi ruang terbuka hijau untuk nilai indeks kualitas lahan di input secara elektronik ke aplikasi sitala melalui laman <https://sitala.kemenvh.go.id/iklh>. Selanjutnya setelah semua komponen indeks telah diinput, dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan indeks kualitas lingkungan



hidup sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup yang terprogram secara otomatis di aplikasi tersebut.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi (%)		
	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,41	67,98	67,30

Sumber : DishubLh Kabupaten Mempawah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 sebesar 67,30 mengalami penurunan sebesar 0,68 dari tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Jangka Menengah
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,30	98,97

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar 67,30% dengan target Jangka Menengah sebesar 98,97%, maka realisasi indikator tersebut di atas belum melebihi target yang telah ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,30	76,49



Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 belum mencapai target nasional.

Adapun penyebab turunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2025 adalah

1. Tidak dilakukan nya sampling udara pada tahun 2025 sehingga kurang terwakilinya suatu wilayah
2. Menurunnya indeks kualitas udara karena pada tahun 2025 Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan rumus baru yang juga menghitung parameter partikulat (PM 2,5) yang tahun sebelum nya tidak dihitung, penggunaan rumus baru tersebut mengaplikasikan perhitungan dengan faktor koreksi yang lebih kecil, sehingga nilai yang didapat lebih akurat dan mendekati senyatanya.

Faktor Penghambat dan Kendala serta Strategis Pemecahan Masalah

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

- 1) Anggaran pengujian kualitas udara direfocusing.
- 2) Kurang nya aksi terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Solusi atau strategi pemecahan masalah yang dihadapi pada sasaran ini antara lain:

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan.
3. Mengaggarkan/menambah titik sampling agar terwakilinya wilayah untuk nilai indeks.
4. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.
5. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/kegiatan, serta lembaga lain terhadap usaha peningkatan kualitas.



e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.677.600	21.177.300	89,44	98,97	NA
Rata – Rata				89,44	98,97	NA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 89,44% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 98,97%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kerjanya belum mencapai 100%.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum diakomodir dalam APBD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada sub kegiatan yang sama, Koordinasi, Sinkronisasi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut seharusnya dilengkapi dengan Uji Kualitas Udara, dimana uji tersebut direncanakan pada tahun 2025.
2. Selanjutnya pada Uji Kualitas Air juga sebaiknya dapat ditambah agar mewakili pengamatan seluruh DAS yang ada di Kabupaten Mempawah. Begitu pula dengan pendataan Indeks Kualitas Lahan, sebaiknya dilakukan pendataan secara komprehensif dan sistematis.



g. Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya :

1. Diperlukan komitmen Kepala Daerah dan seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk bersama-sama berperan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah
2. Diperlukan Peraturan Daerah mengenai pengendalian pencemaran air, udara dan lahan
3. Meningkatkan peran serta Masyarakat dan stakeholder dalam program pengendalian pencemaran Lingkungan
4. Meningkatkan inovasi dan publikasi ke media terkait program pengendalian pencemaran Lingkungan

2.3.2.14. Sasaran 14 : " Meningkatkan Ketahanan Bencana"

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, berkelanjutan, aman dan tertib. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Resiko Bencana. Indeks Risiko Bencana adalah instrumen berbasis data yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana (rendah, sedang, tinggi) di suatu wilayah, yang disusun oleh BNPB untuk perencanaan pembangunan dan mitigasi. Indeks ini berfungsi sebagai panduan kebijakan bagi pemerintah nasional dan daerah dalam menentukan prioritas penanggulangan bencana, serta memantau penurunan risiko bencana. Adapun penjelasan realisasi kinerja secara rinci sebagai berikut :

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Resiko Bencana	Indeks	185	90,33	185,51
Capaian Kinerja				185,51

Sumber : BPBD Kabupaten Mempawah, 2026



Berdasarkan tabel di atas, indeks resiko bencana telah melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 90,33 kategori “Resiko Rendah” dan capaian kinerja sebesar 185,51%. Faktor penentu utama keberhasilan diperoleh melalui pemenuhan 7 standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana, seperti penguatan kelembagaan BPBD dan penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Indeks Resiko Bencana di peroleh berdasarkan Surat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-49/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut klasifikasi nilai Indeks Resiko Bencana :

No	Nilai	Kategori
1	>144	Resiko Tinggi
2	13 - 144	Resiko Sedang
3	<13	Resiko Rendah

Dalam perhitungan kebencanaan, semakin rendah nilai indeks, semakin baik kondisi daerah tersebut dalam menghadapi ancaman bencana. Penghitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang digunakan oleh BNPB adalah hasil perkalian antara bahaya (Hazard/H), kerentanan (Vulnerability/V), dan paparan (Exposure/E), kemudian dibagi dengan kapasitas (Capacity/C).

Komponen Utama Perhitungan IRBI sebagai berikut :

1. Bahaya (hazard) (H) : Potensi kejadian bencana (gempa, banjir dll).
2. Kerencanaan (vulnerability) (V) : Tingkat kerapuhan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan.
3. Paparan (exposure) (E) : Jumlah jiwa, aset atau wilayah yang terpapar.
4. Kapasitas (capacity) (C) : Kemampuan daerah untuk menanggulangi bencana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Indeks Resiko Bencana	185,04	160	90,33	-	-	185,51

Sumber : BPBD Kabupaten Mempawah, 2026



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya tren penurunan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) yang sangat signifikan selama periode 2023 hingga 2025. Penurunan dari 185,04 ke 90,33 menunjukkan bahwa daerah tersebut telah melakukan langkah mitigasi yang sangat efektif. Sesuai standar BNPB, nilai 90,33 sudah masuk dalam kategori Risiko Sedang. Secara keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan performa yang sangat positif. Dalam waktu tiga tahun, Kabupaten Mempawah berhasil menekan risiko bencana hingga lebih dari 50% dari nilai awal, yang berarti masyarakat kini jauh lebih aman dibandingkan tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Jangka Menengah
		2025	
Indeks Resiko bencana	Indeks	90,33	-

Berhubung telah ditetapkan RPJMD 2025-2029 Untuk tahun 2026 indikator Indeks Resiko Bencana tidak menjadi Indikator Kinerja Utama sehingga target jangka menengah untuk indikator ini tidak dapat ditampilkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Nasional

SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2025	TARGET NASIONAL
Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Resiko Bencana	90,33	-

Target indikator resiko bencana Nasional tidak tersedia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Hambatan dalam pencapaian kinerja pada indikator ini antara lain :

1. Keterbatasan dana APBD untuk membangun infrastruktur mitigasi yang mahal.
2. Masih banyaknya pembangunan pemukiman di zona rawan bencana (zona merah).



3. Pengetahuan masyarakat tentang bencana yang seringkali bersifat sesaat (hanya ingat saat ada kejadian).
4. Data kebencanaan yang seringkali tidak terpusat (tersebar di berbagai dinas) sehingga penanganan terlambat.
5. Munculnya ancaman bencana baru atau peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim global.

Upaya Pemecahan masalah yang dihadapi sebagai berikut :

1. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) khusus untuk pengadaan alat peringatan dini atau penanaman vegetasi dan mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa bagi pembentukan dan operasional Desa Tangguh Bencana (Destana).
2. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) khusus untuk pengadaan alat peringatan dini atau penanaman vegetasi dan mendorong pemerintah desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa bagi pembentukan dan operasional Desa Tangguh Bencana (Destana).
3. Edukasi Melalui Satuan Pendidikan melalui implmentasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah untuk membentuk budaya sadar bencana sejak dini, dan melakukan simulasi evakuasi secara berkala (misal: setiap tanggal 26 melalui Hari Kesiapsiagaan Bencana) agar prosedur evakuasi menjadi memori otot masyarakat.
4. Membangun *dashboard* integrasi data yang menggabungkan data cuaca BMKG, sensor debit air, dan data logistik BPBD yang dapat diakses semua OPD (*Local Early Warning System*).
5. Melakukan rehabilitasi lahan kritis dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi sebagai daerah parkir air untuk mengurangi risiko banjir perkotaan.

Strategi/Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya

Adapun strategi untuk meningkatkan capaian Indeks Resiko Bencana adalah sebagai berikut :



1. Internalisasi Risiko ke dalam Perencanaan Pembangunan (Mainstreaming) Strategi ini memastikan bahwa penurunan indeks risiko bukan hanya tanggung jawab BPBD, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Digitalisasi dan Pemutakhiran Data secara Real-Time, Untuk menjaga akurasi skor IRB, data kapasitas dan ancaman harus terus diperbarui.
3. Transformasi Masyarakat dari "Objek" menjadi "Subjek" Penurunan IRB yang signifikan dari 184 ke 90 menunjukkan kapasitas birokrasi sudah baik, namun ketahanan masyarakat adalah kunci keberlanjutan.
4. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum (Law Enforcement)
5. Inovasi Pembiayaan Alternatif (Risk Transfer), dengan cara mengurangi beban APBD saat terjadi bencana dengan melibatkan sektor keuangan.
6. Kolaborasi Pentahelix Berkala, Melalui pengaktifan kembali Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang melibatkan akademisi untuk kajian teknis, dunia usaha untuk bantuan CSR yang tepat sasaran, dan media massa untuk edukasi publik yang masif dan tidak menyedatkan.

c. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Meningkatnya Ketahanan Bencana	Penanggulangan Bencana	523.171.000	507.205.164	96,95	185,51	88,56
Rata – Rata						88,56

Melalui pergeseran dari anggaran belanja responsive ke arah belanja preventif, yaitu menggeser beberapa matan anggaran belanja responsive menjadi anggaran penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana.

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,95 % dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 185,51%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 88,56. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan sangat efisien.



d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota dengan kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Program dan Kegiatan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja yang belum di akomodir dalam APBD antara lain :

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Program ini adalah "tulang punggung" untuk meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) secara cepat.
Kegiatan: Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Perencanaan Bencana.
Sub-Kegiatan: Penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon).

Tujuan: Memberikan landasan hukum dan saintifik dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Kegiatan: Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana).

Sub-Kegiatan: Pelatihan relawan desa, pembuatan peta evakuasi tingkat desa, dan pembentukan forum relawan.

Tujuan: Mengurangi kerentanan sosial dengan menciptakan kemandirian masyarakat di tingkat tapak.

2. Program Mitigasi dan Penanggulangan Dampak, berfokus pada pengurangan nilai Ancaman (Hazard) dan Kerentanan (Vulnerability) fisik.

Kegiatan: Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Struktural.

Sub-Kegiatan: Pembangunan tanggul banjir, penahan longsor (talud), atau penanaman vegetasi (mangrove/hutan pantai).

Tujuan: Secara fisik menghalangi atau memperkecil dampak kekuatan bencana terhadap pemukiman.

Kegiatan: Penguatan Sistem Peringatan Dini (EWS).

Sub-Kegiatan: Pemasangan sensor banjir/longsor berbasis IoT dan pengadaan radio komunikasi kebencanaan.

Tujuan: Memastikan *golden time* (waktu evakuasi) tersedia bagi warga sebelum bencana melanda.

3. Program Layanan Informasi Kebencanaan, melalui peningkatan literasi masyarakat agar risiko dapat ditekan melalui pengetahuan.

Kegiatan: Edukasi dan Sosialisasi melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Sub-Kegiatan: Simulasi rutin di sekolah-sekolah dan integrasi materi kebencanaan dalam kurikulum lokal.

Tujuan: Menanamkan budaya sadar bencana pada generasi muda sebagai investasi jangka panjang.



Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi melalui Dashboard Terpadu.

Sub-Kegiatan: Operasional Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) 24/7.

Tujuan: Mempercepat respon darurat dan keakuratan data korban serta kerusakan.

4. Program Penguatan Tata Kelola (Mainstreaming), dengan cara memasukkan isu bencana ke dalam seluruh sektor pemerintahan.

Kegiatan: Pengawasan Penerapan Standar Teknis Bangunan Tahan Gempa.

Sub-Kegiatan: Audit kelayakan gedung publik dan pengetatan izin bangunan di zona risiko tinggi. Tujuan: Mengurangi kerentanan bangunan fisik terhadap ancaman gempa bumi.

2.3.3. REALISASI ANGGARAN

Secara khusus untuk program dan kegiatan yang bersifat prioritas/utama (core business) Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan program yang mendukung indikator keberhasilan pada sasaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2025, terdiri dari:

No.	Sasaran dan Program	Alokasi Dana T.A 2025 (Rp)	Realisasi Dana T.A 2025 (Rp)	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	Pengelolaan Pendidikan	70.482.439.122	69.482.082.352	98,58
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan			
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.485.408.148	72.350.857.013	87,71
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.219.385.902	1.709.228.337	77,01
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	396.674.529	363.895.406	91,73
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	284.388.224	262.516.052	92,30
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	277.035.032	246.136.410	88,84
3.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sejahtera dan Responsif Gender			



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000	39.252.595	98,13
4.	Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien			
	Penunjang Urusan Program Pemda Kegiatan Penataan Organisasi	95.620.100	91.491.145	95,68
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	145.253.100.852	76.568.305.405	52,71
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	647.342.640	621.392.281	95,99
5.	Meningkatnya Pelayanan Prima Kepada Publik			
	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan Penataan Organisasi	95.620.100	91.491.145	95,68
6.	Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	Aplikasi Informatika	100.080.722	100.080.722	100
	Informasi dan Komunikasi Publik	5.522.230	5.522.230	100
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	7.122.500	7.122.500	100
	Penyelenggaraan Sektor	5.733.900	5.733.900	100
7.	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah			
	Penigkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	106.476.000	106.471.200	99,95
	Perikanan pengelolaan perikanan tangkap	1.335.073.300	43.932.646	3,29
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	370.827.500	365.275.787	98,50
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	1.518.343.300	995.454.765	65,56
	Pengelolaan perikanan budidaya	142.179.737	140.939.947	99,12



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100.000.000	99.830.600	99,83
	Penyuluhan pertanian	1.289.452.300	1.267.849.765	98,32
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	119.532.500	115.996.708	97,04
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	412.136.620	407.337.176	98,83
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	53.498.212	52.036.981	97,26
	Perencanaan dan pembangunan industri	350.951.600	349.989.534	99,72
	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	15.491.100	15.400.279	99,41
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	11.885.100	11.813.817	99,40
	Pengembangan kebudayaan	2.557.644.000	2.549.310.496	99,67
	Pengembangan kesenian tradisional	348.478.500	347.600.305	99,74
	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	1.162.315.040	209.229.289	18
	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	415.300.000	413.067.674	99,46
	Pemasaran pariwisata	373.361.750	373.133.042	99,94
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	32.804.100	32.327.282	98,54
	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	36.196.900	33.145.760	91,57



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	46.068.852	38.733.484	84,07
	Pengelolaan pendapatan daerah	1.846.750.316	1.794.195.707	97,15
8.	Menurunnya Kemiskinan			
	Pemberdayaan Sosial	270.763.708	243.409.202	89,89
	Rehabilitasi Sosial	748.640.008	645.117.633	86,17
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	73.747.436	67.606.903	91,67
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.893.075.710	2.758.699.712	95,35
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	106.476.000	106.471.200	99,99
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	119.532.500	115.996.708	97,04
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	412.136.620	407.337.176	98,83
9.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat			
	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	38.804.100	32.327.282	83,31
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	246.600.000	198.840.514	80,63
	Pelayanan Penanaman Modal	30.242.400	29.637.564	98
10.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2.893.075.701	2.758.699.712	95,35



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Mempawah
Tahun 2025

11	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja serta Peningkatan Kapasitas dan Perlindungan Kerja			
	Penempatan Tenaga Kerja	40.315.860	40.315.860	100
12.	Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan			
	Kawasan Permukiman	400.777.600	377.271.930	94,13
	Penyelenggaraan jalan	41.733.357.110	33.892.383.403	81,21
13.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.677.600	21.177.300	89,44
14	Meningkatnya Ketahanan Bencana			
	Penanggulangan Bencana	523.171.000	507.205.164	96,95